



LAKIP INTERIM

BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANJARMASIN

Triwulan II (dua)

2021

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk Triwulan II tahun 2021 ini dapat disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

LAKIP Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk Triwulan II tahun 2021 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama Triwulan II Tahun Anggaran 2021. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja periode Triwulan II untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

Secara umum, target dan sasaran kinerja Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk Triwulan II tahun 2021 belum dapat dicapai sesuai yang ditargetkan.

Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode Triwulan II Tahun 2021 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2021 ini. Komitmen dan kerjasama semua pihak baik jajaran internal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, atas tersusunnya Laporan ini. Kami berharap kritik membangun demi optimalisasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mendukung kinerja Badan POM. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, 20 Juli 2021

**Kepala Balai Besar POM
di Banjarmasin,**



Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. BBPOM di Banjarmasin sebagai salah satu di antaranya juga membuat laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan POM dan para pemangku kepentingan (**stakeholders**), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin dan upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 ditetapkan dengan SK Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin HK.02.02.109.05.20.1728 tanggal 18 Mei 2020, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Terdapat 11 sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin yang diturunkan dari Sasaran strategis dari peta strategi level 0 Kepala Badan POM, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 memperoleh NPS 97,94 (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat : target 83,6% ; realisasi 81,71% ; capaian kinerja 97,74% (**Baik**)
 - b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan

- hasil pengawasan : target 80% ; realisasi 85,61% ; capaian kinerja 107,01% (**Baik**)
- c. Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan : target 85% ; realisasi 76,76% ; capaian kinerja 90,30% (**Baik**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan : target 86% ; realisasi 83,16% ; capaian kinerja 96,70% (**Baik**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 belum dapat diperoleh NPS nya, dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin , pada triwulan II tahun 2021 belum dapat diperoleh NPS nya, dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
 - b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 memperoleh NPS 106,82% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- a. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan : target 89% ; realisasi 72,49% ; capaian kinerja 81,45% (**Cukup**)
 - b. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 60% ; realisasi 57,19% ; capaian kinerja 95,32% (**Baik**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 88% ; realisasi 97,77% ; capaian kinerja 111,11% (**Sangat Baik**)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : target 35% ; realisasi 46,55% ; capaian kinerja 133% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) kemudian disesuaikan untuk perhitungan NPS menjadi 120% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan : target 57% ; realisasi 64,97% ; capaian kinerja 113,98% (**Sangat Baik**)
 - f. Indeks Pelayanan Publik : target 3,46% ; realisasi 3,67% ; capaian kinerja 106,07% (**Baik**)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 memperoleh NPS 101,38% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin : target 85,41% ; realisasi 90,82% ; capaian kinerja 106,33% (**Baik**)
 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman : target progress 60% ; realisasi 45,5% ; capaian kinerja 75,83% (**Cukup**)
 - Jumlah desa pangan aman : target progress 50% ; realisasi 57,5% ; capaian kinerja 115% (**Sangat Baik**)
 - Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya : target progress 60% ; realisasi 65% ; capaian kinerja 108,33% (**Baik**)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 memperoleh NPS 98,92% (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar : target 45% ; realisasi 49,57% ; capaian kinerja 110,16% (**Sangat Baik**)
 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar : target 45% ; realisasi 39,46% ; capaian kinerja 87,69% (**Cukup**)
7. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan II tahun 2021 memperoleh NPS 39,54% (**Sangat Kurang**) dengan indikator kinerja,

- a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan : target 50% ; realisasi 19,77% ; capaian kinerja 39,54% (**Sangat Kurang**)
8. Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif, pada triwulan II tahun 2021 belum dapat diperoleh NPS nya dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
 - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada triwulan II tahun 2021 belum dapat diperoleh NPS nya dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
10. Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan, pada triwulan II tahun 2021 diperoleh NPS 103,75 (**Baik**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP : target - ; realisasi - ; capaian kinerja - (**Belum Dinilai**)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal : target 2% ; realisasi 2,075% ; capaian kinerja 103,75% (**Baik**)
11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada triwulan II tahun 2021 diperoleh NPS 81,21 (**Cukup**) dengan indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja :

- a. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin : target 65% ; realisasi 52,59% ; capaian kinerja 80,91% (**Cukup**)
- b. Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar BPOM di Banjarmasin : target Efisien (92%) ; realisasi Tidak Efisien (75%) ; capaian kinerja 81,52% (**Cukup**)

Pagu anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 sesuai DIPA nomor Nomor : SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp. 55.781.064.000,- , dan mengalami pemotongan anggaran (refocussing) khusus belanja pegawai (tunjangan kinerja ke 14 dan 14) sehingga pagu menjadi 54.730.000.000 dengan komposisi anggaran yang didominasi Belanja Modal (53) sebesar Rp.26.095.141.000,- atau 47,68% , kemudian Belanja Barang (52) sebesar Rp.16.804.153.000,- atau 30,70% , serta Belanja Pegawai (51) sebesar Rp.11.830.706.000,- atau 21,62%. Komposisi ini sangat berpengaruh besar dalam capaian realisasi anggaran, dimana hampir seluruh belanja modal belum dapat direalisasikan dalam triwulan II tahun 2021.

Berdasarkan aplikasi OMSPAN, realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.000.236.633,- atau 27,41%. Serapan anggaran paling tinggi adalah belanja pegawai (51) sebesar 52,25%, diikuti oleh belanja barang (52) 38,56%, dan belanja modal (53) sebesar 9,19%.

Hasil pengukuran tingkat efisiensi pada triwulan II tahun 2021 ini, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (IE) lebih besar dari 1 (satu) sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah nilai 75% dengan kriteria **Tidak Efisien**. Nilai tersebut berasal dari 11 Sasaran Kinerja dan 28 Indikator Kinerja, dimana seluruhnya memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi adalah Tidak Efisien.

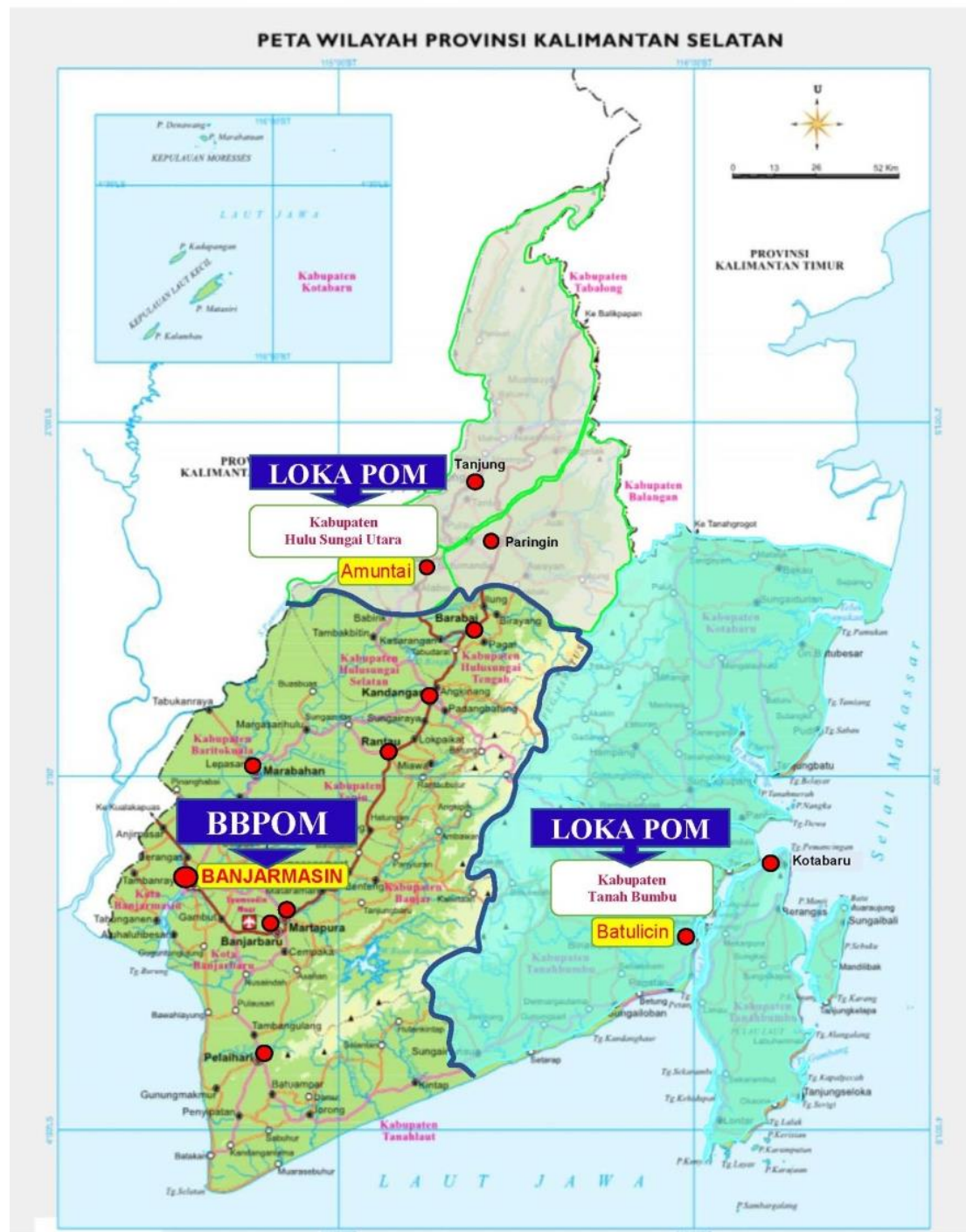
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang mengkoordinir 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah kerja 3 kabupaten dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kerja 2 kabupaten. Pembagian wilayah kerjanya sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Peta wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja

Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah kerja
Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	1. Kota Banjarmasin, 2. Kota Banjarbaru, 3. Kabupaten Banjar, 4. Kabupaten Tanah Laut, 5. Kabupaten Barito Kuala, 6. Kabupaten Tapin, 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2. Kabupaten Balangan, 3. Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	1. Kabupaten Tanah Bumbu, 2. Kabupaten Kota Baru

Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam

menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membanjirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.

- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals*

bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

- a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan KIE kepada masyarakat.
- b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

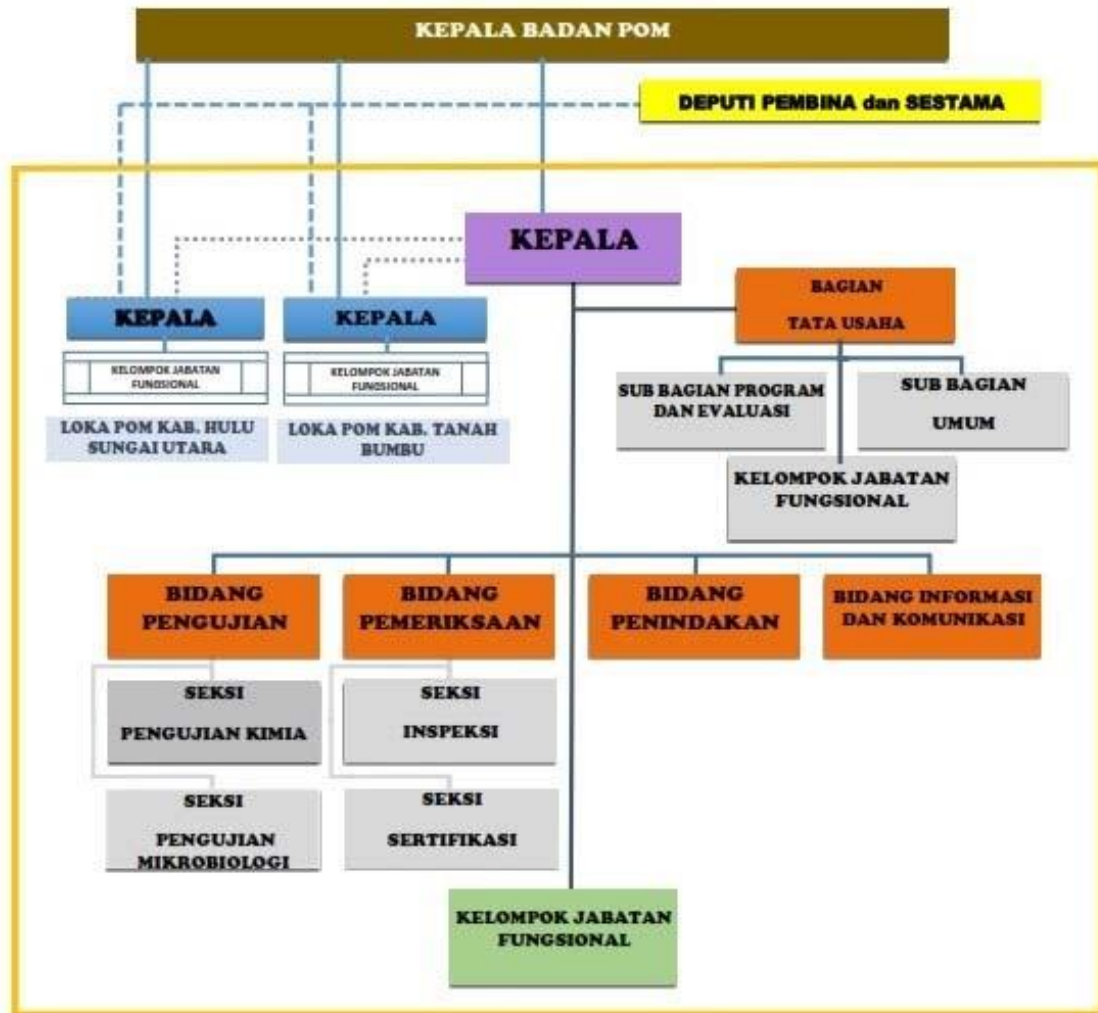
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 15) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.
- 16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 17) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan

Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- 18) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 19) Bermula dari merebaknya virus Corona jenis baru (SARS-CoV-2), yang disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), di dataran negeri Tiongkok tepatnya di provinsi Wuhan pada akhir 2019, seluruh negara di dunia seolah diterpa krisis besar. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini juga berpengaruh pada negara kita. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Konferensi Pers di Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Menyusul pernyataan tersebut, Kementerian Keuangan juga mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) yang kemudian menjadi pedoman seluruh Eselon I untuk menerapkan kebijakan serupa hingga unit layanan terkecil di daerah.

1.4. Struktur Organisasi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi

Bidang Pengujian

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi :

- penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;

- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Kimia ; Tugas : melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Mikrobiologi ; Tugas : melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Seksi Inspeksi ; Tugas: melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi Tugas: melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas: Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Tata Usaha

Tugas: Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;

- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Program & Evaluasi Tugas: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Umum Tugas: melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum

menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai **74,1%**. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi **55,7%**, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

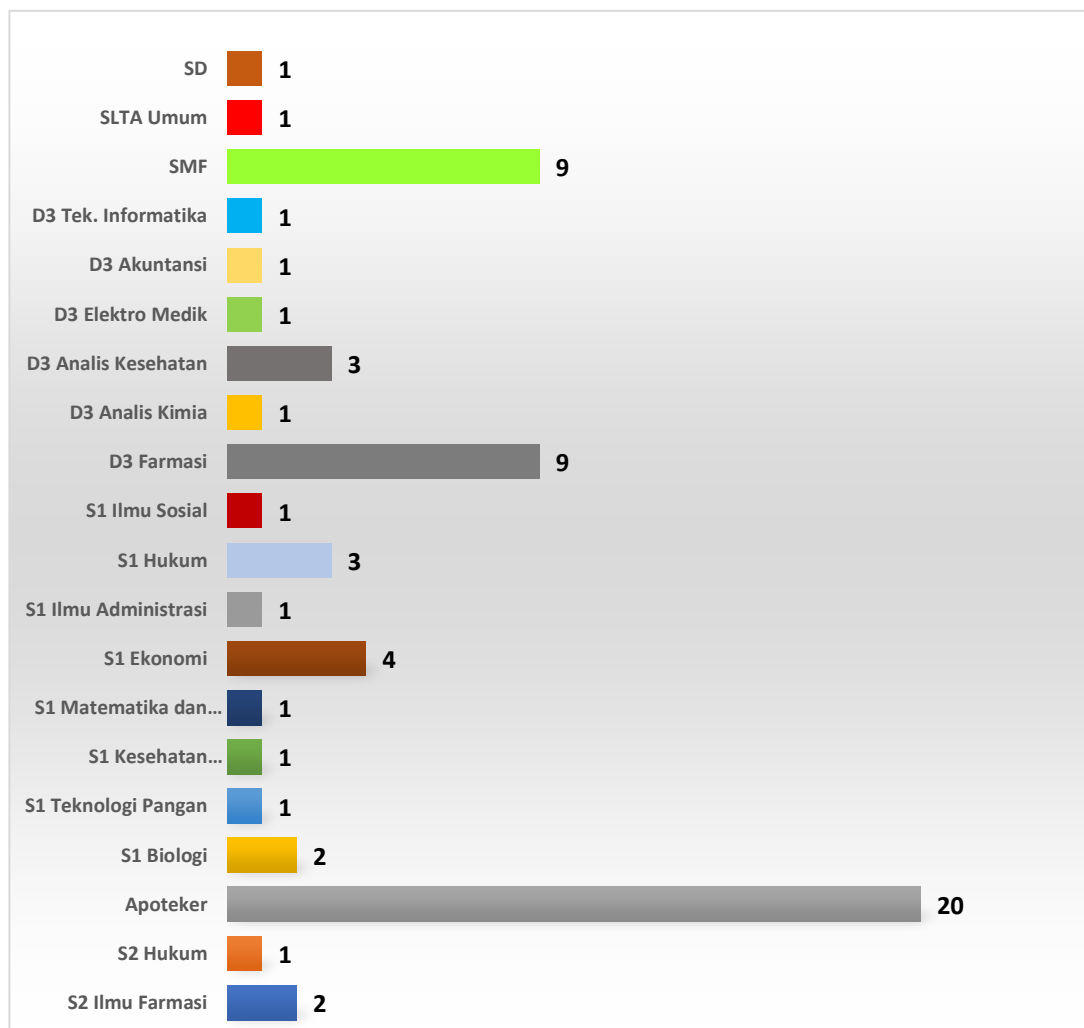
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 adalah sejumlah 64 orang.

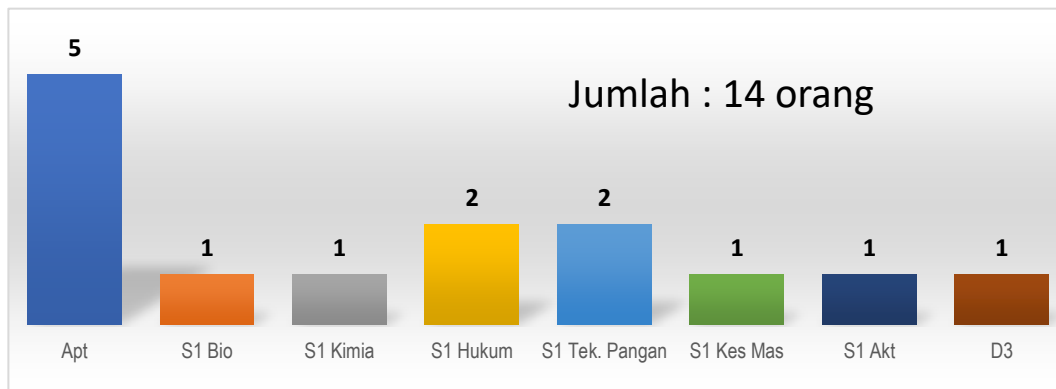
2. Sumber Daya Manusia

Profil Pegawai BBPOM di Banjarmasin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

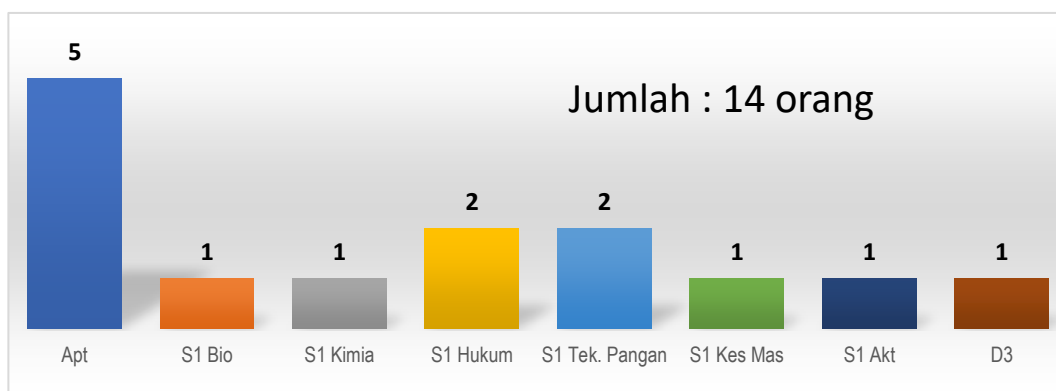
Balai Besar POM di Banjarmasin



Loka POM DI Kabupaten Hulu Sungai Utara



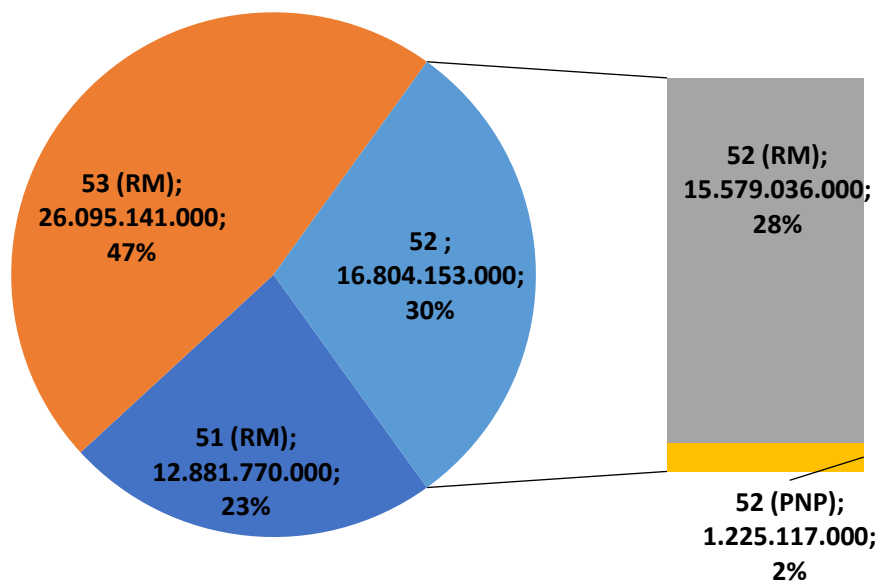
Loka POM di Kabupaten Tanah Bambu



3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp. 55.781.064.000,-** (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pagu anggaran tersebut terbagi ke dalam 3 Jenis Belanja, yaitu : Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53). Sedangkan menurut Jenis Beban terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan komposisi sebagai berikut :



1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13

Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berikut adalah data-data hasil survei BPS yang diperlukan untuk pengawasan maupun melaksanakan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

Tabel 1. 2 Hasil survei BPS sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)
KALIMANTAN SELATAN	4.182.695
TANAH LAUT	339.195
KOTABARU	336.719
BANJAR	580.026
BARITO KUALA	310.016
TAPIN	189.081
HULU SUNGAI SELATAN	235.217
HULU SUNGAI TENGAH	269.384
HULU SUNGAI UTARA	234.604
TABALONG	250.809
TANAH BUMBU	351.673
BALANGAN	129.505
KOTA BANJARMASIN	700.869
KOTA BANJAR BARU	255.597

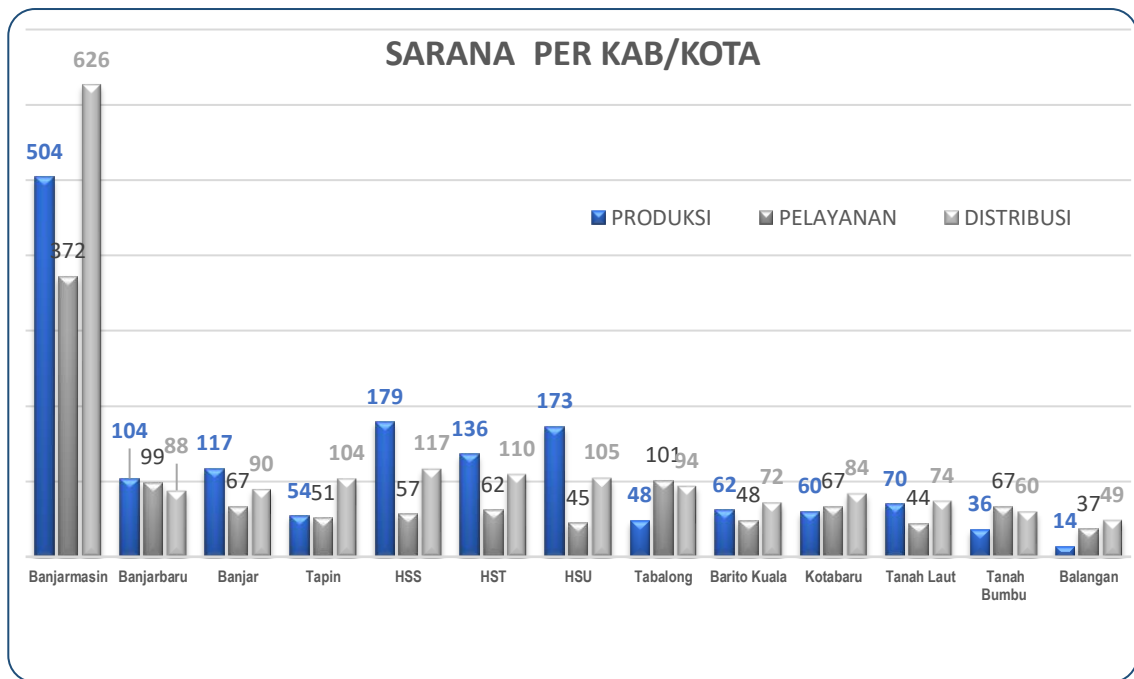
2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2020 berjumlah 5.281 sarana, yang terdiri dari 1.551 sarana produksi, 2.607 sarana distribusi dan 1.117 sarana pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	43	1.152	1.152
Pangan MD	28	894	-	922
Kosmetika	10	388	-	398
Bahan Berbahaya	-	4	-	4
Obat Tradisional	6	298	-	304
Suplemen Makanan	-	298	-	298
JUMLAH	44	1.925	1.152	2.821
PIRT	1.507			1.507

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 34,45%, sisanya tersebar hampir merata di 12 Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Grafik 1. 1 Jumlah Sarana per Kabupaten/Kota

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Badan POM :

- 1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

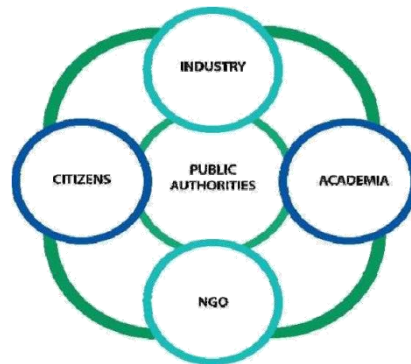
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2. 1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model

dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2. 2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. ***Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat

diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

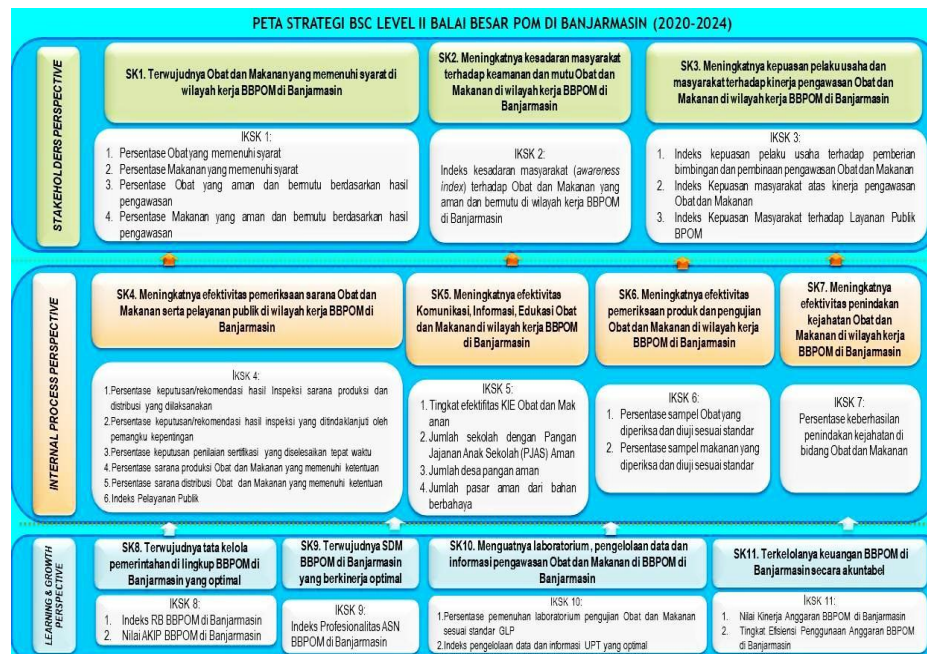
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2 Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin berikut:



Gambar 2. 3 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	IKSK 6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024.**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**

- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki

kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92 di akhir tahun 2024.**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 83 di akhir tahun 2024.**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh

sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 90% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 24% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024.**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran

(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90,64% di tahun 2024.**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 22 di akhir tahun 2024.**
- 3) Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 di akhir tahun 2024.**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 2 di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90 di tahun 2024.**

3. **Learning and Growth Perspective:**

a. **Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk

mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 95 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 85 % di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya

fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 80% di tahun 2024.**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 97 di tahun 2024.**
- 2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.**

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder	SK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
	SK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
	SK 3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90,55
Internal Process	SK 4	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik	3,46
	SK 5	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
	SK 6	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90
	SK 7	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83
Learning and Growth	SK 8	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	89
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	84
	SK 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	77
	SK 10	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77

PERSPEKTIF	SK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2
	SK 11	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp.37.769.707.000,- |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp.18.011.357.000,- |
| Jumlah | Rp.55.781.064.000,- |

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 2. 3 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak Efisien apabila TE<0 atau TE>1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja .

Pada LAKIP Interim BBPOM di Banjarmasin Triwulan II tahun 2021 ini, dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi di Triwulan II tahun 2021, membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2020, dan membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan target Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 sebagai tahun yang sedang dijalani.

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja Triwulan II tahun 2021, diperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Total yang dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II tahun 2021 adalah 90,13 dengan kriteria **Baik**, yaitu :

Tabel 3. 1.1 Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif - BBPOM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021

No.	Perspektif	Nilai	Kriteria
1	<i>Stakeholder</i>	97,94	Baik
2	<i>Internal Process</i>	86,66	Cukup
3	<i>Learning and Growth</i>	92,48	Baik
	Total	92,36	Baik

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatannya masing-masing, yaitu :

Tabel 3.1.2 Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan BBPOM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	NPS TW1 2021	Kriteria
A	Perspektif <i>Stakeholder</i>		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97,94	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
	NPS Perspektif <i>Stakeholder</i>	97,94	Baik
B	Perspektif <i>Internal Process</i>		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	106,82	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	NPS TW1 2021	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	101,38	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,92	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	39,54	Sangat kurang
	NPS Perspektif <i>Internal Process</i>	86,66	Cukup
C	Perspektif <i>Learn and Growth</i>		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	Belum Dinilai
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	103,75	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	81,21	Cukup
	NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i>	92,48	Baik
	NPS Total	92,36	Baik

Berdasarkan tabel di atas, dari 11 Sasaran Kegiatan, hanya 7 yang bisa dihitung Nilai Pencapaian Strategisnya, sedangkan 4 belum bisa dinilai.

Kemudian Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan

penyesuaian hasil perhitungan NPS secara manual menggunakan matriks capaian RAPK dengan batas tertinggi NPS adalah 120%.

Dari 28 Indikator Kinerja (IK) yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin, hanya 20 Indikator Kinerja (IK) yang dapat dinilai pencapaian kinerjanya pada Triwulan II tahun 2021, sedangkan 8 lainnya belum diperoleh realisasi penilaian kinerjanya. Dari 20 Indikator Kinerja (IK) yang sudah memiliki nilai, terdapat 4 IKU dengan NPS dengan kriteria **Sangat Baik**, yaitu IKS11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin (111,11%), IKS13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (113,00%), dan IKS19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (110,16%) . Terdapat 1 Indikator yang capaiannya melebihi 120% yaitu SKIK12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (133,00%) sehingga masuk ke dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. 1 Indikator Kinerja (IK) yang NPSnya **Sangat Kurang**, yaitu IKS21 Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin (39,54%)

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya,

Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, nomor HK.02.02.109.05.20.1728 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin, yang mengacu kepada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Besar POM di Banjarmasin (level 2) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) level 0 Kepala Badan POM, dimana pada tiap Sasaran Kegiatan terdapat satu atau lebih Indikator Kinerja, dengan jumlah seluruhnya 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan.

Pada Triwulan II tahun 2021, capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Triwulan III Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	81,71	97,74	Baik
		IKSK 02	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	85,61	107,01	Baik
		IKSK 03	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	85	76,76	90,30	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Triwulan III Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
		IKSK 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	83,16	96,70	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 05	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 06	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK 07	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK 08	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 09	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	72,49	81,45	Cukup
		IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	60	57,19	95,32	Baik
		IKSK 11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88	97,77	111,11	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Triwulan III Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
		IKSK 12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	46,55	133,00	Sangat Baik
		IKSK 13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	57	64,97	113,98	Sangat Baik
		IKSK 14	Indeks Pelayanan Publik	3,46	3,67	106,07	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	85,41	90,82	106,33	Baik
		IKSK 16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	60%	45,5%	75,83	Cukup
		IKSK 17	Jumlah desa pangan aman	50%	57,5%	115,00	Sangat Baik
		IKSK 18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%	65%	108,33	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	49,57	110,16	Sangat Baik
		IKSK 20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	39,46	87,69	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IKSK 21	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	50	19,77	39,54	Sangat kurang
Learning & Growth Perspective							
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IKSK 22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK 23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 24	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	Belum Dinilai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Triwulan III Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK 26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2	2,075	103,75	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	65	52,59	80,91	Cukup
		IKSK 28	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien (92%)	Tidak Efisien (75%)	81,52	Cukup

Berdasarkan data pada tabel diatas Analisis Akuntabilitas Kinerjanya adalah sebagai berikut :

3.2.1.Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah Sampel Obat Acak Memenuhi Syarat (MS) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Total Sampel Obat Acak yang Diperiksa dan Diuji sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Definisi “Obat” pada tahun 2020 mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017, dan terdapat perubahan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu selain hasil ujinya tidak memenuhi syarat, obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dalam pemenuhan label walaupun memenuhi syarat dalam hasil uji juga dikategorikan TMS. Obat tanpa izin edar, telah kedaluarsa atau rusak juga tetap disampling meskipun tidak diuji, dan obat dengan kategori ini disimpulkan TMS sehingga berpengaruh terhadap realisasi Obat yang Memenuhi Syarat.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.1.1 Realisasi Kinerja IKS.1.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	211	131	75	128	545	81,71
Total yang Diperiksa dan Diuji	246	162	105	154	667	

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa meskipun pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sudah dimulai dari bulan Januari 2021, namun pada bulan tersebut belum ada sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan baru diperoleh data pada bulan Februari dan Maret.

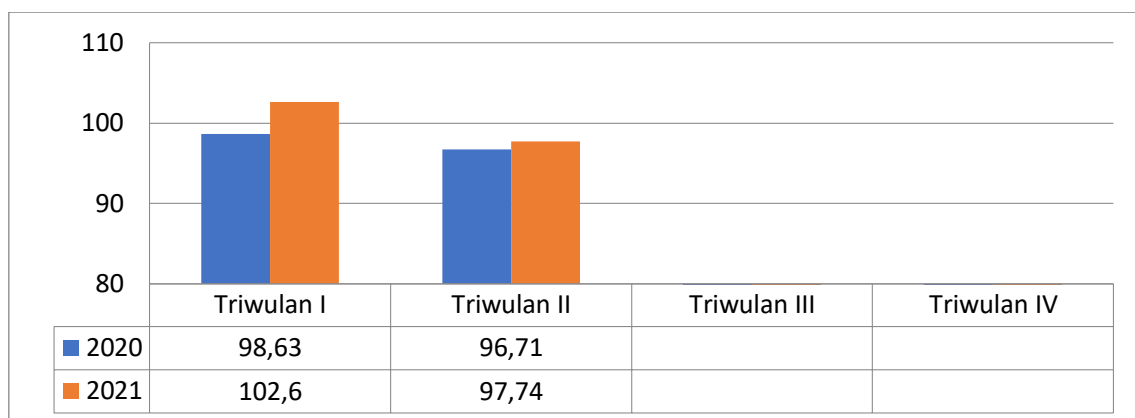
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.1.2 Capaian Kinerja IKS.1.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
83,6	81,71	97,74	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.1.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.1.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020

yang hanya memperoleh capaian sebesar 98,63%. Namun apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sampel maka terjadi penurunan dimana pada tahun 2020 total sampel Obat dan diperiksa dan diuji adalah sebanyak 366 sampel, dengan jumlah yang MS sebanyak 286 sampel.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021, capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (102,60%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 83,60%.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.426.642.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.28.213.687,- atau 6,61%.

**Tabel 3.2.1.1.3 Efisiensi Anggaran IKS.1.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60 %	6.61 %	15,51	14,51	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 15,51 dengan tingkat efisiensi sebesar 14,51 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % **(tidak efisien)**.

3.2.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah Sampel Makanan Acak Memenuhi Syarat (MS) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Total Sampel Obat Acak yang Diperiksa dan Diuji sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.2.1 Realisasi Kinerja IKS.1.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	106	1	59	60	226	85,61
Total yang Diperiksa dan Diuji	127	6	70	61	264	

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa meskipun pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sudah dimulai dari bulan Januari 2021, namun pada bulan tersebut hanya 3 sampel yang selesai periksa dan diuji.

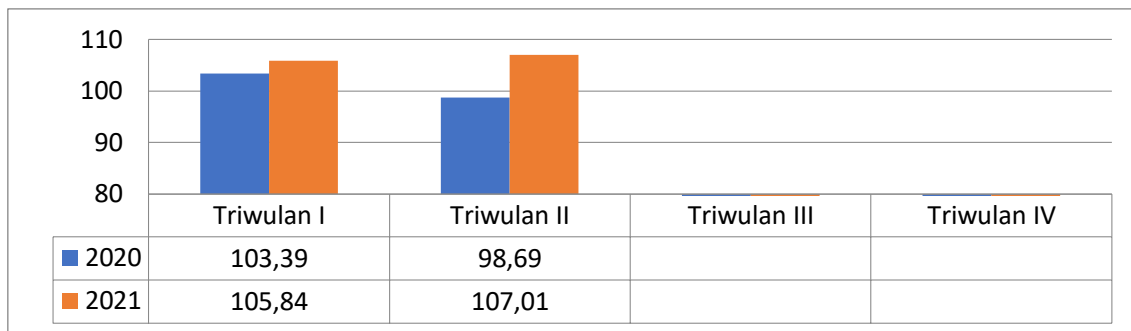
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.2.2 Capaian Kinerja IKS.1.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
80	85,61	107,01	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.2.1.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.1.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 103,39%, begitu juga apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sampel maka terjadi kenaikan dimana pada tahun 2020 total sampel Makanan Acak dan diperiksa dan diuji adalah sebanyak 31 sampel, dengan jumlah yang MS sebanyak 25 sampel.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021, capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (105,84%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 80%.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 269.841.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 9.260.408,- atau 3,43%.

**Tabel 3.2.1.2.3 Realisasi Kinerja IKS.1.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	105,84 %	3,43 %	30,84	29,84	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 30,84 dengan tingkat efisiensi sebesar 29,84 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**).

3.2.1.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan merupakan indikator yang dinilai berdasarkan sampel obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan menggunakan data sampling *targeted/purposive*.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah Sampel Obat *Targetted* Memenuhi Syarat (MS) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan

dengan Total Sampel Obat *Targetted* yang Diperiksa dan Diuji sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.3.1 Realisasi Kinerja IKS.1.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	60	32	22	28	142	76,76
Total yang Diperiksa dan Diuji	72	46	32	35	185	

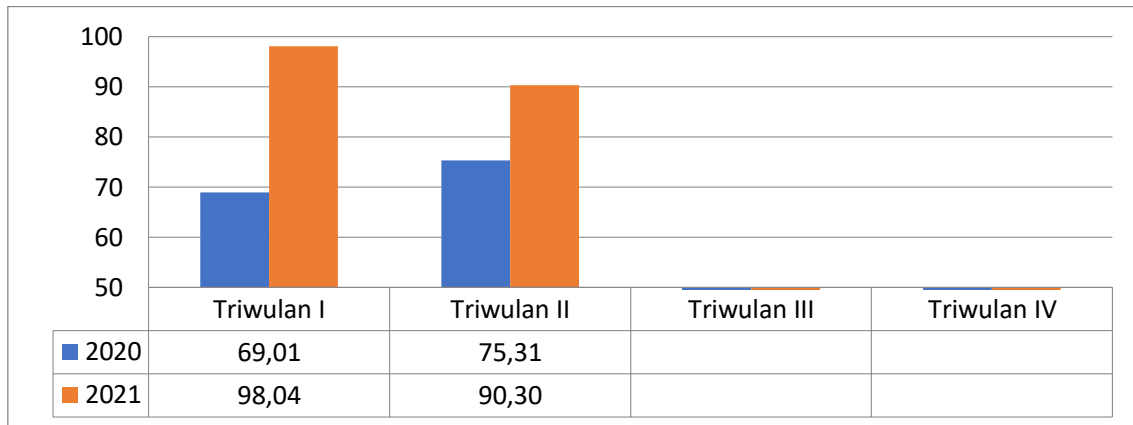
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.3.2 Capaian Kinerja IKS.1.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
85	76,76	90,30	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.1.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.1.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang hanya memperoleh capaian sebesar 69,01%. Hal ini disebabkan oleh penetapan target triwulan/tahun 2021 (94%) jauh lebih tinggi dibandingkan target nasional (85%), sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja, sementara realisasi indikator kinerjanya adalah 64,86%, yang apabila dibandingkan dengan target nasional saat itu, capaiannya adalah 80,91%. Sedangkan untuk tahun 2021, target triwulanan/tahunan disesuaikan dengan target nasional, sehingga capaian kinerja indikator ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (98,04%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 85%.

Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sampel maka terjadi kenaikan dimana pada tahun 2020 total sampel Obat *Targetted* yang diperiksa dan diuji adalah sebanyak 74 sampel, dengan jumlah yang MS sebanyak 48 sampel.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di

Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.426.642.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.28.213.687,- atau 6,61%.

**Tabel 3.2.1.3.3 Efisiensi Anggaran IKS.1.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,04 %	6.61 %	14,83	13,83	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 14,83 dengan tingkat efisiensi sebesar 13,83 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**).

3.2.1.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan merupakan indikator yang dinilai berdasarkan sampel Makanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan menggunakan data sampling *targeted/purposive*.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah Sampel Makanan *Targetted* Memenuhi Syarat (MS) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Total Sampel Makanan *Targetted* yang Diperiksa dan Diuji sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.4.1 Realisasi Kinerja IKS.1.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	50	24	0	5	79	83,16
Total yang Diperiksa dan Diuji	56	34	0	5	95	

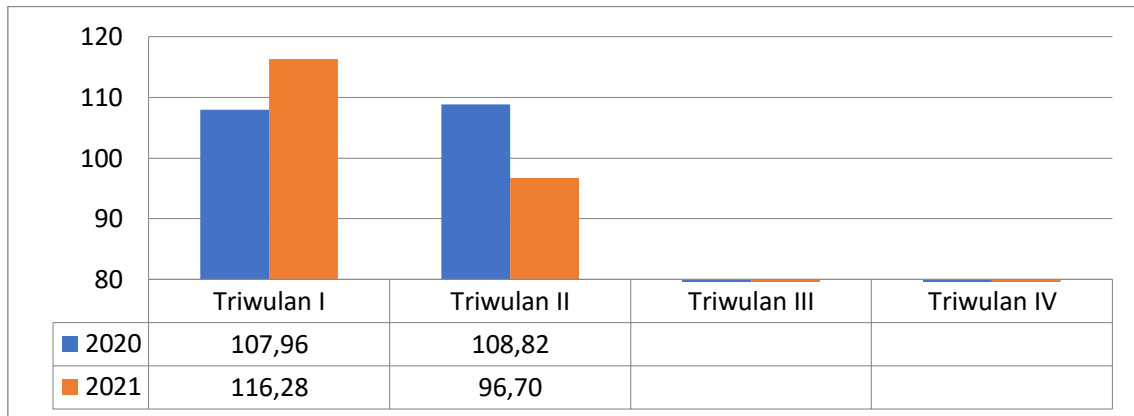
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1.4.2 Capaian Kinerja IKS.1.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
86	83,16	96,70	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.1.4.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.1.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 107,96%. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021, capaian kinerja indikator ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (116,28%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 86%.

Namun apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sampel maka terjadi kenaikan dimana pada tahun 2020 total sampel Makanan *Targetted* yang diperiksa dan diuji adalah sebanyak 85 sampel, dengan jumlah yang MS sebanyak 78 sampel atau 91,76%

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.269.841.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.9.260.408,- atau 3,43%.

**Tabel 3.2.1.4.3 Efisiensi Anggaran IKS.1.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan Anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	116.28 %	3,43 %	33,88	32,88	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 33,88 dengan tingkat efisiensi sebesar 32,88 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**).

3.2.2. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1.2.2.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana sistem pengawasan Obat dan Makanan efektif dilakukan. Pengukuran dilakukan terhadap tingkat

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait bagaimana cara memilih produk Obat dan Makanan sebelum digunakan.

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja indeks kesadaran masyarakat yang ditetapkan adalah 71, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 68, yang pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 78,36 dengan capaian sebesar 115,24% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Meskipun belum diperoleh nilai kinerjanya, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai memanfaatkan anggaran sebesar Rp.51.294.563,- atau 9,62% dari pagu anggaran sebesar Rp. 533.065.000,-, tetapi untuk menilai apakah penggunaan anggaran tersebut efisien, belum bisa dilakukan.

3.2.3.Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.3.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/ sertifikasi produk Obat dan Makanan. Survey indeks kepuasan pelaku usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari : Desk Pelayanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB , Pendampingan UMKM Pangan Olahan dan Pendampingan/ Fasilitasi E-Registration Pangan Olahan.

Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep Service Quality dari aspek/ dimensi : *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness (RATER)*. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*. Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/ petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada

(toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

Pada tahun 2021 target indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin yang ditetapkan adalah 87,5, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 86, yang pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 96,35 dengan capaian sebesar 112,03% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Meskipun belum diperoleh nilai kinerjanya, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai memanfaatkan anggaran sebesar Rp.15.710.000,- atau 12,54% dari pagu anggaran sebesar Rp.125.239.000,- , tetapi untuk menilai apakah penggunaan anggaran tersebut efisien, belum bisa dilakukan.

3.2.3.2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur indikator Kinerja ini dilakukan Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan (PRKOM). Survei ini bersifat komposit skala nasional dan provinsi. Metodologi survei menggunakan *Quantitative Research*, potong lintang (*Cross-sectional*) dengan perhitungan sampel menggunakan *margin of error* (MoE 10%) yaitu 11.570, yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Pemilihan sampel menggunakan *Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proporsional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata perkotaan/ pedesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun.

Penetapan responden berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) 11.570 yang terdiri dari jumlah kabupaten 450, jumlah kecamatan 1099, jumlah desa 1153 dan jumlah blok sensus 1157. Pengambilan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview* terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi, *tools* kuesioner di *install* di *smartphone* enumerator.

Analisis data dilakukan dengan skala likert dengan indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Interpretasi indeks mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Skor	Interpretasi
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 – 60,00	Kurang Baik
60,01 – 75,00	Cukup Baik
75,01 – 90,00	Baik
≥ 90,01	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur pada tahun 2020, dengan target sebesar 72,00 sebagai *baseline* data (target nasional 70,00).

Target indikator kinerja indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 75 , lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72 , yang pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 76,11 dengan capaian sebesar 105,71% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Meskipun belum diperoleh nilai kinerjanya, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai memanfaatkan anggaran sebesar Rp.15.710.000,- atau 12,54% dari pagu anggaran sebesar Rp.125.239.000,- , tetapi untuk menilai apakah penggunaan anggaran tersebut efisien, belum bisa dilakukan.

3.2.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Jenis pelayanan publik di Balai Besar POM di Banjarmasin ada 3 (tiga), yaitu : pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan sertifikasi, dan pelayanan pengujian.

Survei kepuasan masyarakat diberikan kepada responden yang menerima manfaat dari masing-masing layanan, pada periode tertentu, dengan jumlah tertentu, yang menilai 9 (sembilan) unsur pelayanan :

1. persyaratan pelayanan,
2. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
3. waktu penyelesaian,
4. biaya/ tarif pelayanan,
5. produk spesifikasi jenis pelayanan,
6. kompetensi pelaksana,
7. perilaku pelaksana,
8. penanganan pengaduan, saran dan masukan bagi pelayanan yang diberikan, serta
9. sarana dan prasarana pelayanan.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 90,55 , lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 88,50 , yang pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 89,18 dengan capaian sebesar 100,77% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021, tentunya dengan melakukan perbaikan dan peningkatan, baik sarana dan prasarana maupun kualitas layanan publik.

3.2.4.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A =	<i>Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</i>
------------	--

B =	<i>Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%</i>
C =	<i>Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</i>
D =	<i>Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%</i>

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil

pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4.1.1 Realisasi Kinerja IKS.4.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Jenis Rekomendasi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	%TL
A	94	64	76	51	43	84	36	37	249	236	94,78
B	34	24	8	0	16	15	12	15	70	54	77,14
C	63	13	18	8	16	5	15	25	112	51	45,54
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Rekomendasi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	%TL
JLH	191	101	61	26	75	104	63	77	431	341	
Rata-rata											72,49

Pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 99 keputusan/ rekomendasi dari 183 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 59,72 % dengan kriteria “**Kurang**”.

Tabel 3.2.4.1.2 Capaian Kinerja IKS.4.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
89	72,49	81,45	Cukup

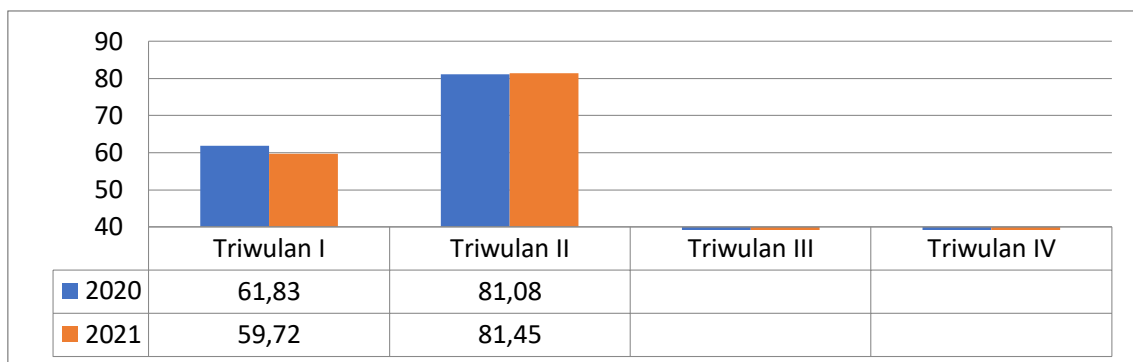
Realisasi indikator kinerja ini sangat bergantung dengan jumlah tindak lanjut yang diterbitkan atau dilaksanakan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan POM/ UPT lain/ lintas sektor. Tindak lanjut yang dilaksanakan dapat dari pihak internal ataupun dari eksternal yaitu Badan POM/ UPT lain/ lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi secara formal maupun non formal kepada UPT lain dan lintas sektor harus selalu ditingkatkan dalam meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Capaian di tahun 2021 adalah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan merupakan gabungan realisasi di BBPOM di

Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu. Nilai persentase terendah didapatkan dari persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan nilai 0 untuk semua wilayah baik Balai maupun Loka.

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.4.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.4.1
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 61,83%. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021, capaian kinerja indikator ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (59,72%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 89%.

Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah rekomendasi maka terjadi kenaikan dimana pada tahun 2020 total rekomendasi yang diterima adalah sebanyak 109, dengan jumlah yang ditindaklanjuti sebanyak 71.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung melaksanakan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran indikator kinerja ini Rp.217.173.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.489.149,- atau 6,21% , Indeks Efisiensi sebesar 9,61 dengan tingkat efisiensi sebesar 8,61 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

Tabel 3.2.4.1.3 Efisiensi Anggaran IKS.1.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2020 – Triwulan II 2021

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	59,72%	6,21%	9,61	8,61	75%

3.2.4.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A =	<i>(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%</i>
------------	--

B =	<i>(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%</i>
------------	--

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.2.1 Realisasi Kinerja IKS.4.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Jenis Rekomendasi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	Rekom	TL	%TL
A	38	16	28	19	21	15	11	9	98	59	60,20
B	13	6	5	1	4	3	2	3	24	13	54,17
JLH	51	22	33	20	25	18	13	12	122	72	
Rata-rata											57,19

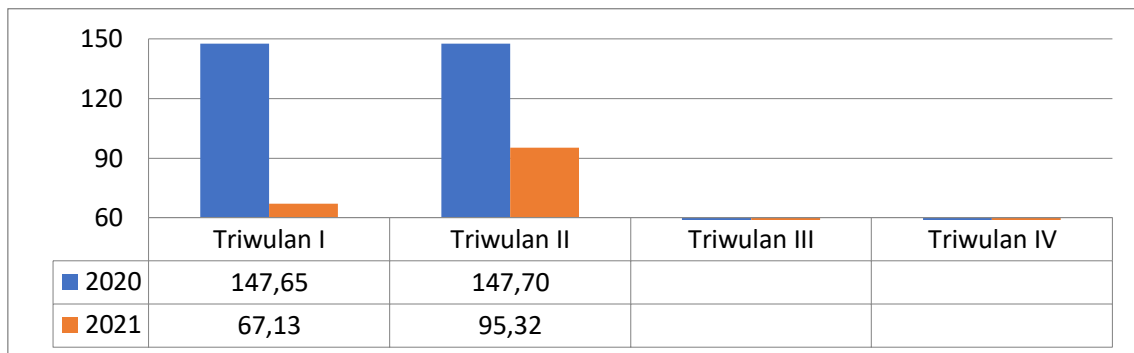
Pada Triwulan II tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 51 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 21 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 67,14% dengan kriteria **“kurang”**.

Tabel 3.2.4.2.2 Capaian Kinerja IKS.4.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
60	57,19	95,32	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.4.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 147,65%. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021, capaian kinerja indikator ini sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (67,13%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 60%.

Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah rekomendasi maka juga terjadi penurunan dimana pada Triwulan II tahun 2020 total rekomendasi yang diterima adalah sebanyak 58, dengan jumlah yang ditindaklanjuti sebanyak 44.

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung melaksanakan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran indikator kinerja ini Rp.387.976.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.489.149,- atau 3,48% , Indeks Efisiensi sebesar 19,31 dengan tingkat efisiensi

sebesar 18,31 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

Tabel 3.2.4.2.3 Efisiensi Anggaran IKS.4.2
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,13%	3,48%	19,31	18,31	75%

3.2.4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.3.1 Realisasi Kinerja IKS.4.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021

Jenis Rekom/ Sert	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	%TTW
SKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rek/ Sert	6	5	5	4	2	1	3	3	15	12	80,00

Jenis Rekom/ Sert	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	PM	TTW	%TTW
PP III	330	330	125	119	97	97	106	100	658	646	98,18
Jumlah	336	335	130	123	99	98	109	103	674	659	97,77

Keterangan

SKI	=	Surat Keterangan Import
SKE	=	Surat Keterangan Eksport
Rek/Sert	=	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB
PP III	=	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga
PM	=	Permohonan Masuk
TTW	=	Rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa dari 4 jenis rekomendasi/sertifikasi yang mampu dilayani oleh BBPOM di Banjarmasin, SKI dan SKE tidak pernah ada permohonan yang masuk.

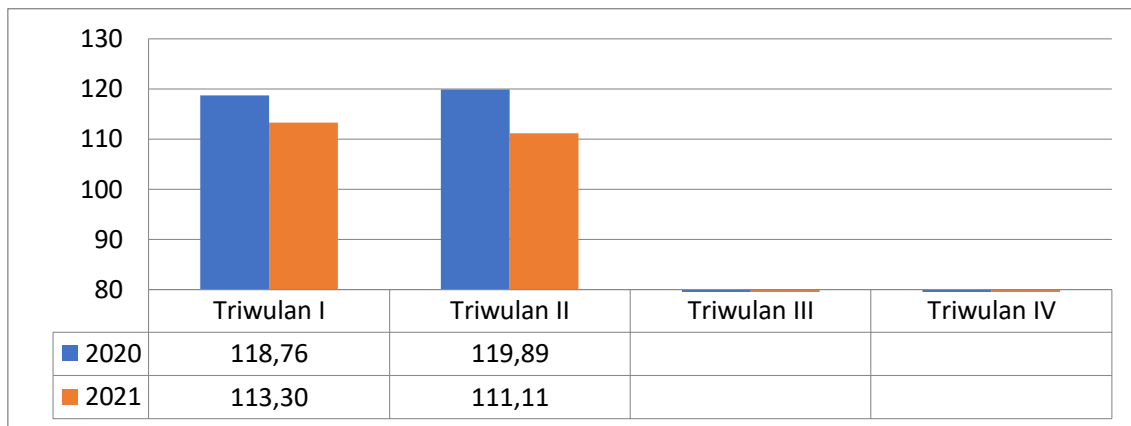
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4.3.2 Capaian Kinerja IKSK.4.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
88	97,77	111,11	Sangat Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.4.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 118,76%. Namun apabila dicermati capaian Triwulan II tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh penetapan target triwulan dan tahun 2020 (82) lebih rendah dari target nasional (85), dengan realisasi 97,38. Sedangkan target tahun 2021, telah mengikuti target nasional.

Begitu juga apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah rekomendasi/sertifikat maka terjadi penurunan dimana pada Triwulan II tahun 2020 Jumlah Permohonan adalah sebanyak 572, dengan jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 558 sampel. Penurunan jumlah tersebut terdapat pada kedua jenis rekomendasi/sertifikasi, dimana yang paling besar penurunannya adalah Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021, capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sama dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (113,30%) karena target triwulanan bersifat tetap selama setahun yaitu 88%.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.64.383.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.987.388,- atau 12,41%.

**Tabel 3.2.4.3.3 Efisiensi Anggaran IKS.4.3
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	113,30 %	12,41 %	9,13	8,13	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 9,13 dengan tingkat efisiensi sebesar 8,13 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan capaian kinerja akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tidak baik atau tidak efisien.

3.2.4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
= (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang
diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%*

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, U MOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

**Tabel 3.2.4.4.1 Jumlah Sarana Produksi IKS.4.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Sarana Produksi	BBPOM Bjn		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T1thn	JS	T1thn	JS	T1thn	JS	T1thn
IOT	2	2	0	0	0	0	2	2
UKOT	2	2	0	0	0	0	2	2
IKos	9	9	0	0	0	0	9	9
IPangan	54	50	2	2	9	9	65	61
IRTP	983	45	247	18	182	11	1.412	74
Jumlah	1.050	108	249	20	191	20	1.490	148

Keterangan

IOT	=	Industri Obat Tradisional
UKOT	=	Usaha Kecil Obat Tradisional
IKos	=	Industri Kosmetik
IPangan	=	Industri Pangan
IRTP	=	Industri Rumah Tangga Pangan
JS	=	Jumlah Sarana yang Ada
T1thn	=	Target sarana yang diperiksa 1 tahun

Pada Triwulan II tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 29 sarana produksi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu dengan hasil sebanyak 11 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 18 sarana masih belum memenuhi

ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 37,93 %. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.4.4.2 Realisasi Kinerja IKSK.4.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Sarana Produksi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	%MK
IOT	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
UKOT	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100
IKos	2	0	2	2	0	0	0	0	4	2	50
IPangan	5	4	7	4	0	0	7	5	19	13	68,42
IRTP	21	6	3	0	2	1	7	3	33	10	30,30
Jumlah	29	11	13	7	2	1	14	8	58	27	46,55

Keterangan

Riksa = Jumlah sarana yang diperiksa
MK = Memenuhi Ketentuan

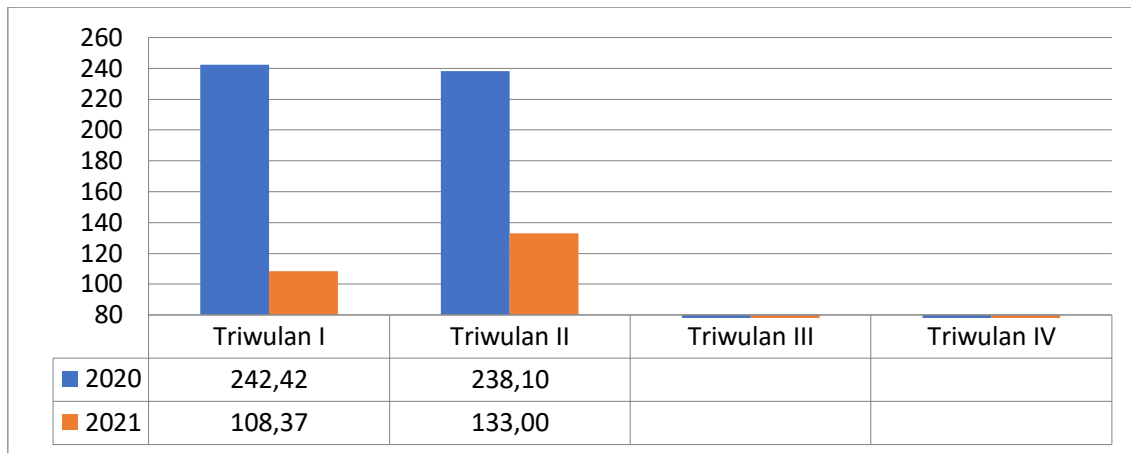
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4.4.3 Capaian Kinerja IKSK.4.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
35	46,55	133,00	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.4.4.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.4.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 242,42%. Namun apabila dicermati capaian Triwulan II tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh penetapan target Triwulan II tahun 2020 (10) lebih rendah dari target Triwulan II tahun 2021 (35), dengan realisasi 24,24. Sedangkan target tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan rata-rata kemampuan BBPOM di Banjarmasin dan kedua Loka POM yang dikoordinirnya.

Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sarana produksi maka terjadi penurunan jumlah yang diperiksa dimana pada Triwulan II tahun 2020 adalah sebanyak 33, namun yang memenuhi ketentuan lebih rendah hanya 8 sarana.

Kemudian karena target triwulanan tahun 2021 bersifat tetap selama setahun dan sama dengan target tahunan 35%, maka capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (108,37%).

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.53.860.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.8.965.000,- atau 16,65%.

**Tabel 3.2.4.4.4 Efisiensi Anggaran IKS.4.4
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	108,37%	16,65%	6,51	5,51	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 6,51 dengan tingkat efisiensi sebesar 5,51 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.4.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan / jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

**Tabel 3.2.4.5.1 Jumlah Sarana Distribusi IKS.4.5
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Sarana Distribusi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T1thn	JS	T1thn	JS	T1thn	JS	T1thn
PBF	38	11	0	0	0	0	38	11
Apt	390	32	56	19	60	13	506	64
TO	222	8	50	5	44	4	316	17
IFP	9	9	3	3	2	2	14	14
RS	34	20	5	5	4	4	43	29
Pkm	148	113	43	34	42	29	233	176
Klinik	139	10	9	8	54	6	202	24
FDOT	205	24	59	8	71	3	335	35
FDSK	205	24	59	8	60	2	324	34
FDKos	312	53	111	14	89	3	512	70
FDPO	719	84	298	38	895	34	1.912	156
Jumlah	2.421	388	693	142	1.322	101	4.436	631

Keterangan

PBF	=	Pedagang Besar Farmasi
Apt	=	Apotek
TO	=	Toko Obat
IFP	=	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah
RS	=	Rumah Sakit
Pkm	=	Puskesmas
Klinik	=	Klinik
FDOT	=	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional
FDSK	=	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
FDKos	=	Fasilitas Distribusi Kosmetik
FDPO	=	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan
JS	=	Jumlah Sarana yang Ada
T1thn	=	Target sarana yang diperiksa 1 tahun

Pada Triwulan II tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 117 sarana distribusi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu dengan hasil sebanyak 77 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 18 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 65,81%. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.4.5.2 Realisasi Kinerja IKSK.4.5
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Sarana Distribusi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	%MK
PBF	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	100
Apt	10	8	7	6	4	2	13	8	34	24	70,59
TO	4	2	2	0	0	0	3	2	9	4	44,44
IFP	6	6	3	3	0	0	0	0	9	9	100
RS	9	7	3	2	0	0	1	1	13	10	76,92
Pkm	38	24	11	11	16	16	18	18	83	69	83,13

Sarana Distribusi	Realisasi										
	Jumlah TW I		April		Mei		Juni		Jumlah TW II		
	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	Riksa	MK	%MK
Klinik	3	2	3	3	1	1	1	0	8	6	75
FDOT	18	11	3	2	0	0	0	0	21	13	61,90
FDSK	1	1	2	2	2	2	1	0	6	5	83,33
FDKos	8	6	5	3	3	0	11	6	27	15	55,56
FDPO	20	10	47	20	31	14	4	3	102	47	46,08
Jumlah	117	77	87	53	58	36	52	38	314	204	64,97

Keterangan

Riksa = Jumlah sarana yang diperiksa

MK = Memenuhi Ketentuan

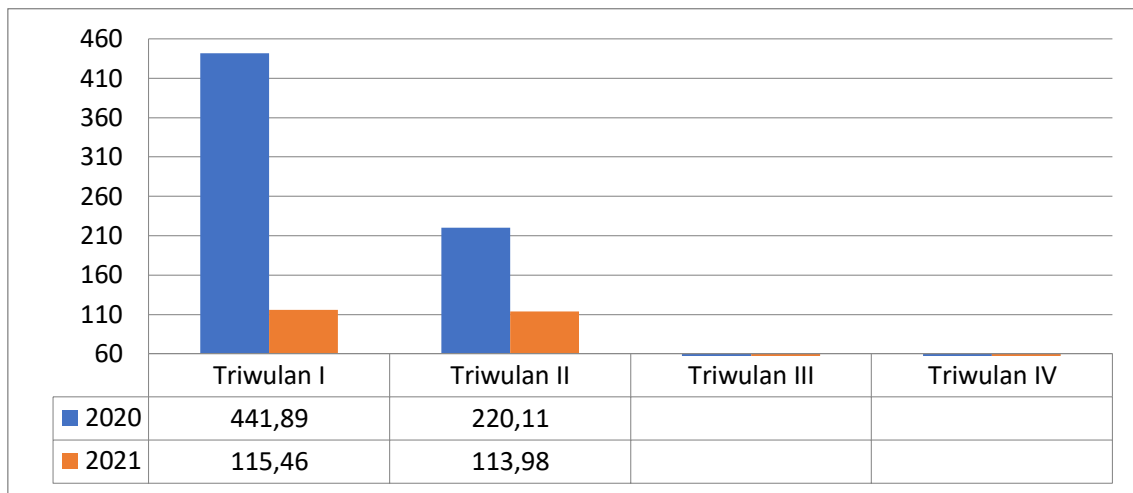
Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4.5.3 Capaian Kinerja IKSK.4.5
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2021**

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
57	64,97	113,98	Sangat Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.2.4.5.1 Perbandingan Capaian Kinerja IKS.4.5
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2020 – Triwulan III 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 441,89%. Namun apabila dicermati capaian Triwulan II tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh penetapan target baik target tahunan maupun triwulanan yang lebih rendah dari target tahun 2021. Penentuan target triwulanan tahun 2020 juga ditetapkan kumulatif, sedangkan tahun 2021 tetap dan sama dengan target tahunan.

Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sarana distribusi maka terjadi peningkatan jumlah yang diperiksa dimana pada Triwulan II tahun 2020 adalah 79 sarana, dan jumlah yang memenuhi ketentuan 48 sarana.

Kemudian karena target triwulanan tahun 2021 bersifat tetap selama setahun dan sama dengan target tahunan 57%, maka capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan capaian Triwulan II tahun 2021 (115,46%).

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.135.507.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.10.025.910,- atau 7,40%.

**Tabel 3.2.4.5.4 Efisiensi Anggaran IKS.4.5
Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	115,46%	7,40%	15,60	14,60	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 15,60 dengan tingkat efisiensi sebesar 14,60 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- 1) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi, responsivitas, integritas.

- 3) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan ruang parkir, ruang tunggu, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, dan *front office*.
- 4) Aspek sistem informasi dan konsultasi terdiri dari sarana konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan adalah 3,46, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 3,11, yang pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 3,69 dengan capaian sebesar 118,65% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Untuk mendorong pencapaian target kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.33.152.500,- namun sampai dengan Triwulan II tahun 2021 ini belum terserap, sehingga belum bisa dilakukan penilaian apakah penggunaan anggaran tersebut efisien atau tidak.

3.2.5.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
3. Jumlah Desa Pangan Aman
4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.5.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra 2020–2024, dan tidak ada pengukuran di tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang disampaikan, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang ditetapkan adalah 85,41 , lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 83,73, dan pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya, namun apabila dibandingkan dengan realisasi terendah tahun 2020 pada Triwulan III sebesar 87,92 , dan rata-rata tahun 2020 sebesar 88,80 dengan capaian 105,65% maka BBPOM di Banjarmasin sangat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Untuk mendorong pencapaian target kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- namun sampai dengan Triwulan II tahun 2021 ini belum terserap, sehingga belum bisa dilakukan penilaian apakah penggunaan anggaran tersebut efisien atau tidak.

3.2.5.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pada tahun 2021, target untuk indikator PJAS aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 40 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 24 sekolah baru ditambah dengan pengawalan terhadap 16 sekolah yang telah dilaksanakan di tahun 2020.

Untuk mengukur realisasinya selain berdasarkan jumlah sekolah, juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan tahapan kegiatannya, yaitu :

No	Tahapan/Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Feb - april
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00	Feb - Juni
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00	April - Nov
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya		Juli - Sept
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00	Juli - Sept
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00	Juli - Sept
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00	Okt - Des
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00	Okt - Des
	JUMLAH	100	

Dengan target persentase tahapan pelaksanaan setiap triwulan sesuai dengan rincian aksi perjanjian kinerja sebagai berikut :

Triwulan			
I	II	III	IV
20%	40%	80%	100%

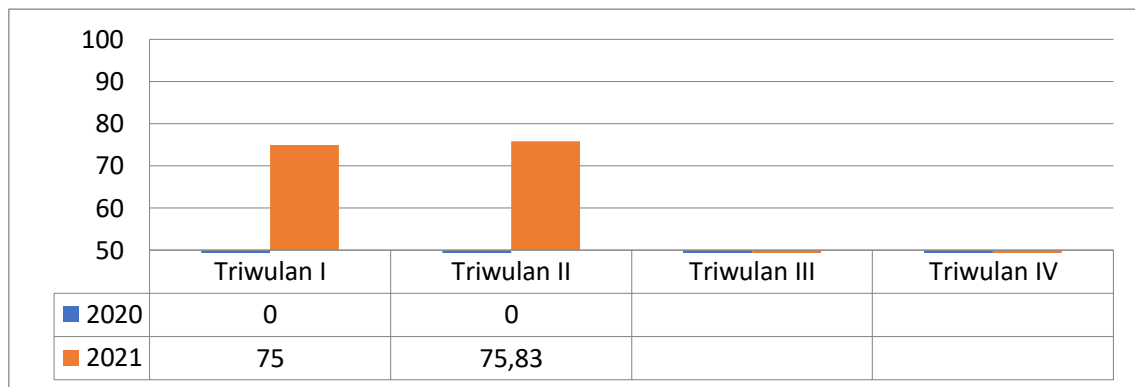
Pada Triwulan II tahun 2021, realisasi tahapan yang telah dilaksanakan sebesar 15%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahapan/Kegiatan	Realisasi				
		Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	10	10	0	0	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	5	0	0	3	5
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	0	0	0	7,5	7,5
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	0	0	0	3	3
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya	0	0	0	0	0
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	0	0	0	0	0
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	0	0	0	0	0
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	0	0	0	0	0
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	0	10	0	0	10
	JUMLAH	15	20	0	13,5	45,5

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
60%	45,5%	75,83%	Cukup

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang pada periode tersebut tidak ada realisasi akibat masa awal pandemi Covid-19.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar

Rp.594.851.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.105.680.000,- atau 17,77%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75%	17,77%	4,22	3,22	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 4,22 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,22 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.5.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Pada tahun 2021, target untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman adalah 12 Desa. Jumlah ini terdiri dari 8 Desa baru ditambah dengan pengawalan terhadap 4 Desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020.

Untuk mengukur realisasinya selain berdasarkan jumlah sekolah, juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan tahapan kegiatannya, yaitu :

No	Tahapan/Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00	Jan-april

No	Tahapan/Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April - Juli
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00	Mei - Okt
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Mei-Nov
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00	Nov - Des
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00	Juni - Des
	JUMLAH	100	

Dengan target persentase tahapan pelaksanaan setiap triwulan sesuai dengan rincian aksi perjanjian kinerja sebagai berikut :

Triwulan			
I	II	III	IV
20%	50%	85%	100%

Pada Triwulan II tahun 2021, realisasi tahapan yang telah dilaksanakan sebesar 15%, dengan rincian sebagai berikut :

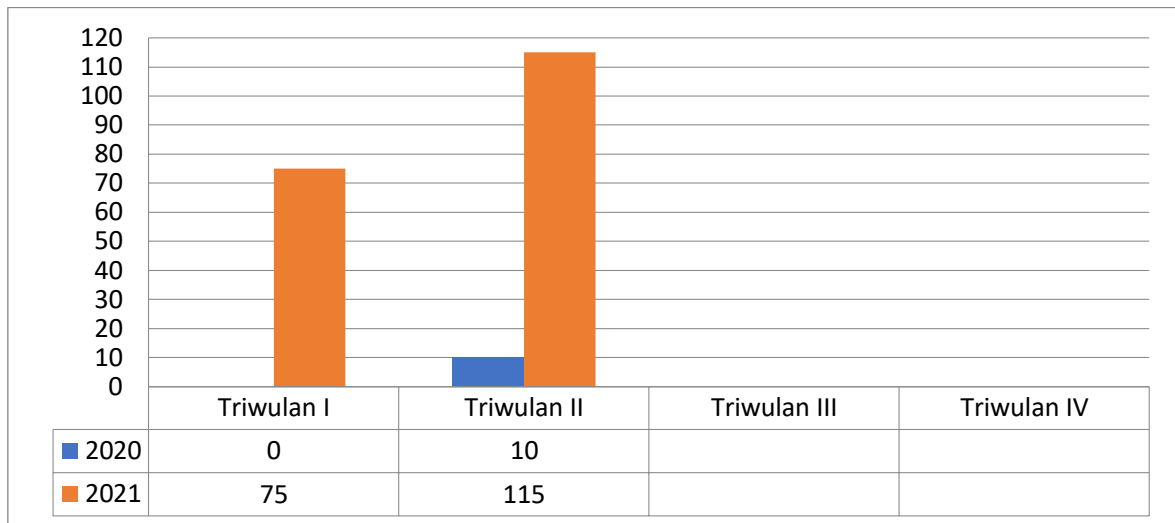
No	Tahapan/Kegiatan	Realisasi				
		Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II
1	Adokasi Kelembagaan Desa	10	10	0	0	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	0	0	0	5

No	Tahapan/Kegiatan	Realisasi				
		Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	0	7,5	7,5	0	15
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	0	0	0	7,5	7,5
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	0	0	0	0	0
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	0	5	5
7	Monitoring dan Evaluasi	0	0	0	0	0
8	Pengawasan tahun sebelumnya	0	0	0	5	5
JUMLAH		15	17,5	7,5	17,5	57,5

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
50%	57,5%	115%	Sangat Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang pada periode tersebut tidak ada realisasi akibat masa awal pandemi Covid-19.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.827.439.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.59.665.000,- atau 7,21%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	75%	7,21%	10,40	9,40	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 10,40 dengan tingkat efisiensi

sebesar 9,40 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.5.4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pada tahun 2021, target untuk indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah 4 Pasar. Jumlah ini terdiri dari 2 Pasar yang baru ditambah dengan pengawalan terhadap 2 Pasar yang telah dilaksanakan di tahun 2020.

Untuk mengukur realisasinya selain berdasarkan jumlah sekolah, juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan tahapan kegiatannya, yaitu :

No	Tahapan/Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan
1	Adokasi	20,00	Jan - Apr
2	Survey Pasar	5,00	Jan
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00	Apr
5	Penyuluhan	5,00	Juni - Juli
6	Kampanye	5,00	Juni - Juli
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00	Sept - Okt
8	Lomba Pasar Aman	10,00	Des
	JUMLAH	100	

Dengan target persentase tahapan pelaksanaan setiap triwulan sesuai dengan rincian aksi perjanjian kinerja sebagai berikut :

Triwulan			
I	II	III	IV
25%	60%	70%	100%

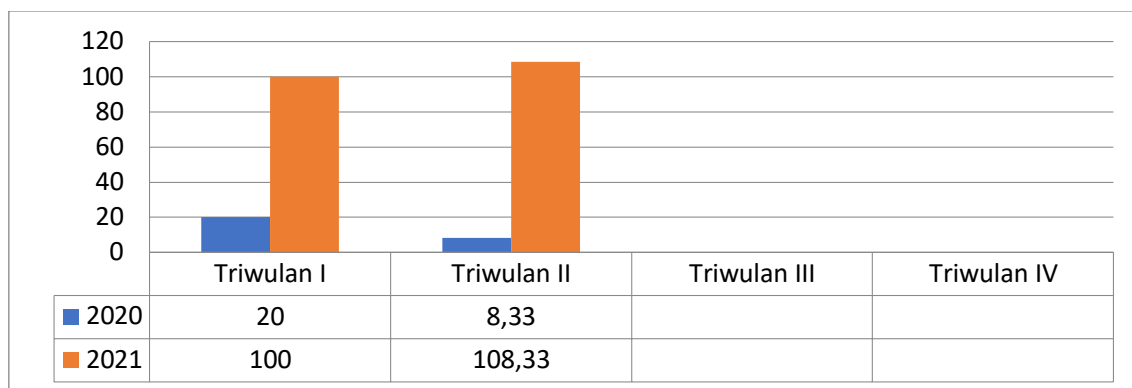
Pada Triwulan II tahun 2021, realisasi tahapan yang telah dilaksanakan sebesar 25%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahapan/Kegiatan	Realisasi				
		Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II
1	Adokasi	10	10	0	0	20
2	Survey Pasar	5	0	0	0	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	0	0	7,5	7,5	15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	0	10	10	0	20
5	Penyuluhan	0	0	2,5	2,5	5
6	Kampanye	0	0	0	0	0
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	0	0	0	0	0
8	Lomba Pasar Aman	0	0	0	0	0
	JUMLAH	25	20	20	10	65

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
60%	65%	108,33%	Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang pada periode tersebut hanya terealisasi 5% berupa survey Pasar, akibat masa awal pandemi Covid-19.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.160.439.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.32.366.600,- atau 7,21%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100%	20,17%	4,96	3,96	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 4,96 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,96 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.6.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.6.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah $(\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar})$ sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan $(\text{Jumlah target sampel Obat yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel Obat yang diuji})$ sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

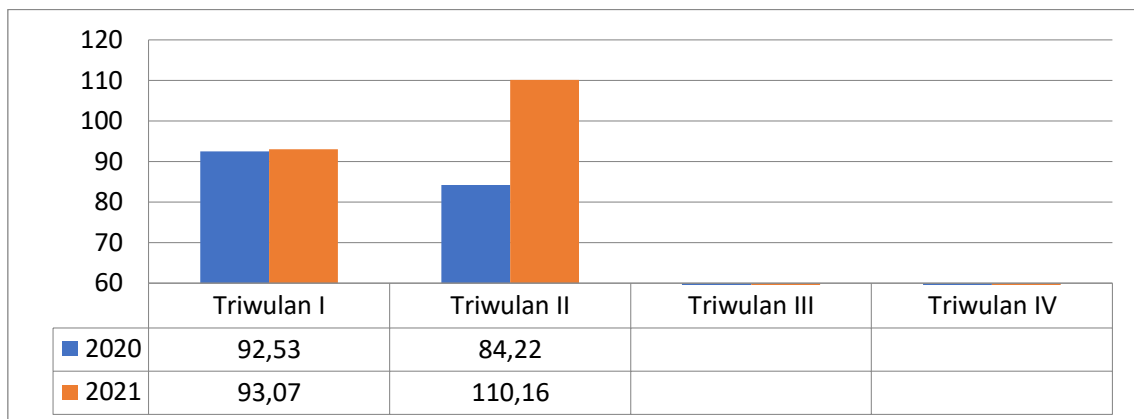
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	551	226	174	256	1207	58,17
Jumlah target sampel Obat yang diperiksa					2.075	
Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar	318	208	137	189	852	41,06
Jumlah target sampel Obat yang diuji					2.075	
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar						49,57

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
45	49,57	110,16	Sangat Baik

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 92,53%, dengan jumlah target sampel Obat, baik yang diperiksa sesuai standar maupun yang diuji sesuai standar sama yaitu 2.075 sampel.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 90%, capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada Triwulan II tahun 2021 hanya 23,27%

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp213.321.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.14.106.844,- atau 6,61%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,07%	6,61 %	14,07	13,07	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 14,07 dengan tingkat efisiensi sebesar 13,07 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan capaian kinerja akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tidak baik atau tidak efisien.

3.2.6.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah (Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah Sampel Makanan yang diuji sesuai standar) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan (Jumlah target Sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target Sampel Makanan yang diuji) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Triwulan II (Januari, Februari dan Maret) tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :

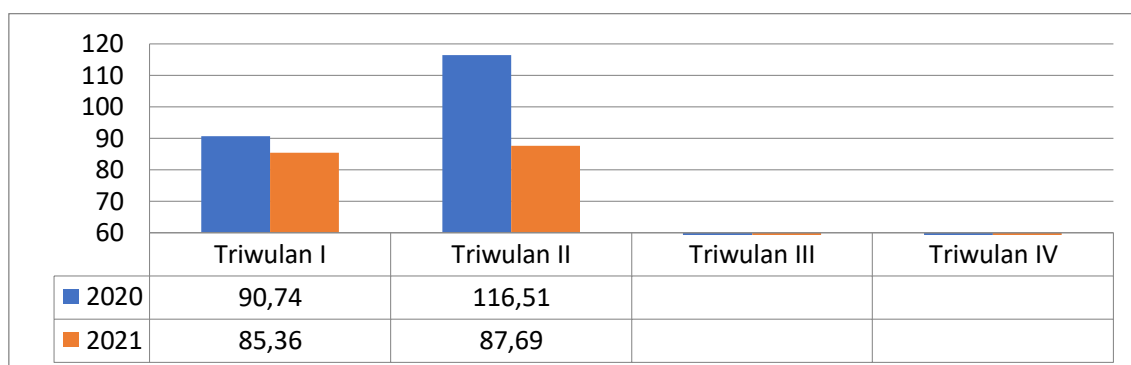
Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	187	66	71	77	401	41,86
Jumlah target Sampel Makanan yang diperiksa					958	

Uraian	Realisasi					
	Jumlah TW I	April	Mei	Juni	Jumlah TW II	%MS
Jumlah Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	183	40	70	66	359	37,47
Jumlah target Sampel Makanan yang diuji					958	
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar						39,46

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
45	39,46	87,69	Cukup

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 90,74%. Berdasarkan jumlah sampel juga terjadi perbedaan, dimana untuk Triwulan II tahun 2020 untuk Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 227 sampel, dan Jumlah Sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 116 sampel.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 90%, capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada Triwulan II tahun 2021 hanya 21,34%

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.134.920.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.4.630.204,- atau 6,61%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,36%	3,43%	27,57	26,57	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 14,07 dengan tingkat efisiensi sebesar 13,07 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 % (**tidak efisien**). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan capaian kinerja akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tidak baik atau tidak efisien.

3.2.7.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

3.2.7.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran/ kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu ***meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa serta memberikan rasa aman pada seluruh warga***, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu ***Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan*** dengan sasaran strategis ***Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin***. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan

fungsi intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 10 (sepuluh) perkara, terdiri dari 8 perkara Balai Besar POM di Banjarmasin, 1 perkara Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan 1 perkara Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Selain itu pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin juga menyelesaikan perkara *carry over* tahun 2020 sebanyak 2 perkara, yang terdiri dari 1 perkara Balai Besar POM di Banjarmasin, dan 1 perkara Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.

Realisasi nilai kinerja Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 7,08% yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

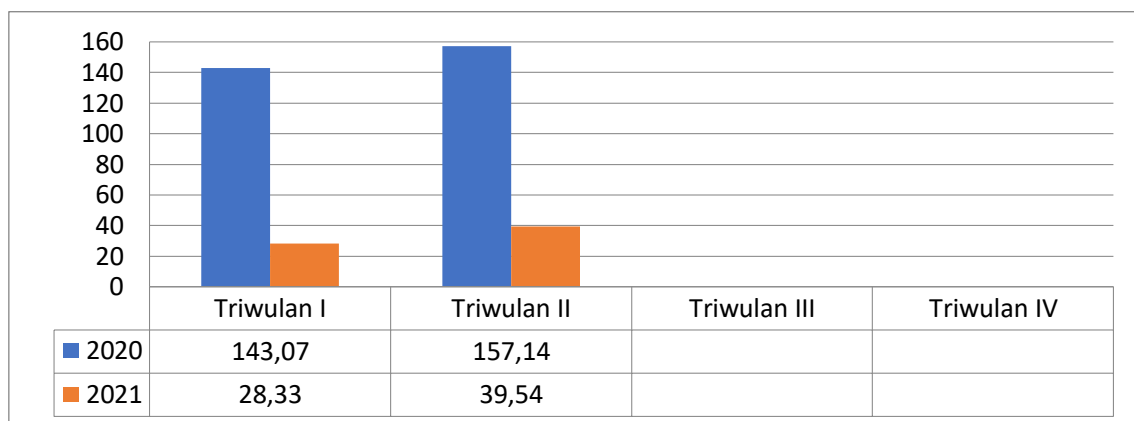
Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	5	0	1,00	-	0,15	15,00%
Tahap I	0	0	0	0,29	0,4	8,89%
P21	0	0	0	0,29	0,3	6,67%
Tahap II	0	2	0	0,29	0,15	3,33%
Realisasi Tahun 2021	0	-				33,89%
Realisasi Carry Over	-	0				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	5	2	0	10	58,33%	19,77%
Target Perkara	10	2				

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2021, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
50	19,77	39,54	Sangat Kurang

Apabila capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Triwulan II tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja antara Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 143,07%. Berdasarkan komposisi perkara juga terdapat perbedaan, dimana untuk tahun 2020 selain target tahun berjalan sebanyak 10 perkara, juga terdapat *carry over* sebanyak 5 perkara.

Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 90%, capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada Triwulan II tahun 2021 hanya 21,34%

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.1.012.044.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.59.589.000,- atau 5,89%.

Indikator Kinerja	Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	28,33%	5%	4,81	3,81	75%

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 4,81 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,81 sehingga capaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 75% (**tidak efisien**).

3.2.8.Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
2. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.8.1. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan dan harus dilakukan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berkomitmen untuk terus melaksanakan RB. Sejak tahun 2010, BPOM menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan RB, dan saat ini merupakan periode pembangunan jangka menengah (5 tahunan) ketiga BPOM melaksanakan RB.

Berbagai pencapaian dalam pelaksanaan RB telah diraih oleh BPOM. Meskipun demikian, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, harapan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meneguhkan BPOM untuk terus berkomitmen dalam melakukan transformasi organisasi melalui RB. RB BPOM dilaksanakan sesuai dengan *Grand Design* RB Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Sesuai dengan *Grand Design*, saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2020-2024 dengan harapan RB akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin

berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan RB periode ketiga ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan sasaran RB pada periode ketiga ini adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mendukung pelaksanaan RB BPOM yang selaras dan sinergi dengan *Grand Design* dan *Road Map* RB, maka perlu disusun dokumen perencanaan pelaksanaan RB BPOM 2020-2024. Selain itu, dokumen perencanaan tersebut juga harus sinergis dan selaras dengan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020. Dokumen perencanaan RB BPOM juga harus dapat mengakomodasi perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan komposisi pegawai BPOM dengan generasi milenial menjadi generasi terbanyak saat ini, perubahan akibat revolusi industri 4.0, dan juga perubahan *landscape* dunia akibat masifnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan *life style* manusia.

Dengan dasar tersebut, maka disusun dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024 yang lebih implementatif, dan tergambar jelas perubahan yang akan dilakukan di BPOM. *Road Map* RB BPOM disusun dengan analisis dan sudut pandang yang lebih holistik, melibatkan berbagai pihak dan unsur dalam internal BPOM dengan harapan *Road Map* disusun lebih komprehensif, dan antisipatif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan RB yang lebih utuh di BPOM. Melalui dokumen

Road Map RB BPOM 2020-2024, diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan RB di BPOM periode 2020-2024 sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan di BPOM.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Unit Kerja

- sesuai Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Target Indeks RB Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM sesuai Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024,

No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81)					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
c.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu UPT Badan POM, yang perolehan nilai Indeks RB tahun 2019 adalah **65,33** di bawah rata-rata nasional 75,81, maka target Indeks RB Balai Besar

POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 85 dan pada akhir RPJM tahun 2024 targetnya adalah 95.

Pada Triwulan II tahun 2021 ini belum dilaksanakan pengukuran, sehingga belum diperoleh nilainya. Meskipun belum diperoleh nilai kinerjanya, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.384.210.000,- namun sampai Triwulan II tahun 2021 belum ada penggunaan anggaran, sehingga untuk menilai apakah penggunaan anggaran tersebut efisien, belum bisa dilakukan.

3.2.8.2. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Balai Besar POM di Banjarmasin.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai dilakukan oleh Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Pada saat penulisan LAKIP interim Triwulan II tahun 2021 ini disusun, tahapan evaluasi yang dilaksanakan adalah pengajuan LKE dalam rangka Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020.

Dalam LKE tersebut Balai Besar POM di Banjarmasin mengajukan nilai sebesar 85,74, dengan komposisi nilai sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	29,75
b	Pengukuran Kinerja	25	19,69
c	Pelaporan Kinerja	15	12,04
d	Evaluasi Internal	10	9,13
e	Capaian Kinerja	20	15,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Dari hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ini, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin dapat mencapai target tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu Tingkat Akuntabilitas Kinerja A dengan nilai 84.

Untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp.429.755.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp.19.981.700,- atau 4,65%. Karena nilai indikator kinerja ini belum ada maka belum dapat dilakukan pengukuran efisiensi penggunaan anggarannya.

3.2.9. Terwujudnya SDM (Sumber Daya Manusia) Balai Besar POM di Banjarmasin yang bekerja optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

3.2.9.1. Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Besar POM di Banjarmasin

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin diperoleh dari skor nilai kualifikasi (Pendidikan), kompetensi (diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/workshop), kinerja, dan disiplin setiap pegawai.

- 1) Kualifikasi yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan setiap pegawai, setiap jabatan. Semakin tinggi Pendidikan, semakin besar nilainya dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total nilai indeks.
- 2) Kompetensi meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat structural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai dengan bobot penilaian 40 %.
- 3) Kinerja dari penilaian SKP dan perilaku menggunakan skala penilaian dengan bobot 30%.
- 4) Disiplin berdasarkan Riwayat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai selama kurun waktu 5 tahun, dengan bobot nilai 5%.

Untuk tahun 2021, target Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 77, dan pada Triwulan II tahun 2021, belum dilakukan penilaian, namun dengan melihat komposisi pegawai yang relatif masih sama dengan tahun 2020, maka capaian indikator kinerja ini diharapkan tidak akan lebih kecil dari realisasi tahun 2020 sebesar 80,16.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar

Rp.1.027.521.000,- , dan sampai Triwulan II tahun 2021 telah terserap sebesar Rp.53.823.000,- atau 5,24%.

3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*)
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*)

Peningkatan kapasitas laboratorium yang modern dan andal sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan salah satu rencana strategis Badan POM, yaitu pengembangan standar dan mutu pengujian dalam rangka mendorong peningkatan daya saing obat dan makanan serta penguatan kelengkapan sarana prasarana laboratorium pengujian

Target indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*) yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 77, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75, sedangkan

pada Triwulan II tahun 2021, belum dilakukan pengukuran, namun berdasarkan data tahun 2020, pencapaian target indikator kinerja ini masih tidak mudah, karena sangat bergantung pada kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik yang baru di Banjarbaru.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp.27.775.084.000,- yang diantaranya terdiri dari anggaran untuk pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik dan pengadaan alat laboratorium. Sampai Triwulan II tahun 2021 anggaran ini baru terserap sebesar Rp.100.163.378,- atau 0,36%.

3.2.10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
- UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Target Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal tahun 2021 sebesar 2, dan ini berlaku juga sebagai target tiap triwulannya. Pada Triwulan II tahun 2021 belum diperoleh nilai hasil pengukuran dari Pusdatin BPOM, sehingga belum diketahui capaian kinerjanya. Begitu juga untuk pengukuran efisiensi penggunaan anggarannya belum dapat dilaksanakan karena dari anggaran yang telah dialokasikan Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar Rp.220.000.000,- sampai Triwulan II tahun 2021 belum ada penggunaan anggaran.

3.2.11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
2. Tingkat Efisiensi Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

3.2.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Pada Renstra BPOM tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran menjadi salah satu indikator untuk penilaian kinerja Badan POM dan UPT di lingkungannya. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan komposisi 60% Nilai IKPA ditambah 40% Nilai EKA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan hasil pengukuran yang disebut Nilai IKPA.

Evaluasi Kinerja Anggaran EKA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin menetapkan target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 94, dengan target tiap triwulan bersifat kumulatif yaitu :

Triwulan			
I	II	III	IV
50	65	80	94

Untuk Triwulan II tahun 2021 ini sampai dengan saat penyusunan LAKIP Interim Triwulan II tahun 2021, nilai yang diperoleh baru dari unsur IKPA saja yaitu sebesar 8345, sedangkan nilai EKA belum ada, baik dari aplikasi SMART Kemenkeu maupun Monev PA.

A. Nilai IKPA

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2021 hal Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, hasil capaian IKPA Satker secara kumulatif akan bermuara pada IKPA Kementerian Negara/Lembaga memiliki bobot **40%** dan sangat berpengaruh dalam Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian IKPA yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 telah ditetapkan **Reformulasi IKPA 2021** dengan perubahan bobot.

Adapun bobot tahun 2021 dan bobot tahun 2019 dan 2020 sebagai perbandingan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2019-2020

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2	Data Kontrak	15%	15%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4	Konfirmasi Capaian Output	-	10%	17%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9	Renkas	5%	5%	5%

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
10	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11	Retur SP2D	6%	5%	5%
12	PaguMinus	4%	5%	5%
13	Dispensasi	4%	5%	5%
	TOTAL	100%	100%	100%

Pada Triwulan II tahun 2021, nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin adalah 83,45 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot TW1 2021	Nilai TW1 2021
1	Penyerapan Anggaran	15%	7,37%
2	Data Kontrak	10%	5,8%
3	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
4	Konfirmasi Capaian Output	0%	0%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	0%	0%
8	LPJ Bendahara	5%	5%
9	Renkas	0%	0%
10	Kesalahan SPM	5%	4,75%
11	Retur SP2D	5%	5%
12	PaguMinus	5%	5%
13	Dispensasi	5%	5%
	TOTAL	73%	60,92%

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan II TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output. Sedangkan untuk Renkas berdasarkan rencana penggunaan dana dengan besaran 5 milyar ke atas, dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021, RPD yang diajukan oleh BBPOM di Banjarmasin belum ada yang berjumlah 5 milyar atau lebih. Sehingga konversi bobot pada Triwulan II tahun 2021 terhadap nilai hanya sebesar 73%. Penilaian akan dilakukan secara penuh mulai pada Triwulan III tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator yang belum maksimal capaian nilainya adalah Penyerapan Anggaran, Data Kontrak dan Kesalahan SPM, dengan faktor penyebab sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2020, hanya sebesar 7,37% dari target penyerapan anggaran Triwulan II sebesar 15% atau capaiannya 49,13%, maka dengan bobot indikatornya sebesar 15% diperoleh nilai akhir yaitu 5,71.

2. Data Kontrak

Pada Triwulan II tahun 2021, nilai untuk Data Kontrak sebesar 58% dengan bobot indikator sebesar 10% maka diperoleh nilai akhir sebesar 5,8. Rendahnya nilai ini karena dari 7 data kontrak yang dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2021, terjadi keterlambatan pendaftaran (lebih dari 5 hari kerja) sebanyak 5 data kontrak, yaitu :

- a. 4 (empat) data kontrak, dilaksanakan tanggal 01 Januari tahun 2021 namun didaftarkan pada 01 Februari tahun 2021 (19 hari kerja).

Keterlambatan ini disebabkan belum adanya Surat Keputusan Kepala BPOM tentang Kuasa Pengguna Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, sebagai tindak lanjut mutasi KPA lama. Ke 4 kontrak tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena terkait penyediaan sarana-prasarana berupa sewa Kantor dan mobil operasional untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

- e. 1 (satu) data kontrak, dilaksanakan tanggal 08 Februari 2021 dan didaftarkan pada 30 Maret 2021 (33 hari kerja).

Keterlambatan ini disebabkan karena kelalaian dalam *update* status data kontrak yang telah didaftarkan, dimana terjadi penolakan oleh system KPPN akibat perubahan rekening penyedia dari rekening bank menjadi *virtual account*.

3. Kesalahan SPM

Dari 145 SPM yang diajukan pada Triwulan II tahun 2021, terjadi kesalahan dan harus diperbaiki sebanyak 2 SPM, sehingga nilai yang diperoleh 95% dari bobot indikatornya sebesar 5% dengan nilai akhir 4,75.

B. Nilai EKA

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran (KA) adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah :

- PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.
- Perdirjen Anggaran Nomor PER-01/AG/2018 tentang Peoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Hingga penyusunan LAKIP Interim Triwulan II tahun 2021 ini dilaksanakan, Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin untuk Triwulan II tahun 2021 belum dapat diperoleh baik dari aplikasi SMART Kemenkeu. Maka berdasarkan perolehan nilai IKPA dan belum adanya nilai EKA Triwulan II tahun 2021, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin Triwulan II tahun 2021 belum bisa ditentukan. Untuk mencapai target indikator kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp.612.565.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2021 terserap sebesar Rp.36.058.306,- atau 5,89%. Karena data belum

lengkap maka belum bisa dilakukan penilaian apakah penggunaan anggaran tersebut sudah efisien atau tidak.

3.2.11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan, dibutuhkan pengukuran dan penetapan beberapa hal sebagai berikut :

a. Indeks efisiensi (IE)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input. Persentase Capaian Output yang dimaksud adalah Persentase Capaian Indeks Kinerja atau Rata-rata Persentase Capaian Indeks Kinerja, sedangkan Persentase Capaian Input adalah Persentase Penyerapan Anggaran per Indeks Kinerja atau Persentase Penyerapan Anggaran seluruhnya.

b. Standar efisiensi (SE) ditetapkan dengan nilai 1

c. Tingkat Efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih besar atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Efisien**,
- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Tidak Efisien**.

- Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:
 - **0 - 0,2 : 100% → Efisien**
 - **0,21 - 0,4 : 95% → Efisien**
 - **0,41 - 0,6 : 92% → Efisien**
 - **0,61 - 0,8 : 90% → Efisien**
 - **0,81 - 1,0 : 88% → Efisien**
 - **1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien**
 - **1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien**
 - **1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien**
 - **1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien**
 - **> 1,81 : 75% → Tidak Efisien**
- Atau dengan kata lain penentuan kriteria Efisien sebagai berikut :
 - 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - 2) Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Target Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 adalah Efisien dengan nilai 92%, dengan target triwulanan yang sama.

Pada Triwulan II tahun 2021 dari 28 indikator kinerja yang diperoleh nilainya untuk perhitungan tingkat efisiensi anggaran hanya 19 indikator kinerja, dengan rata-rata 88,72%. Sementara anggaran yang telah terserap baru Rp.4.113.185.453,- dari pagu sebesar Rp.55.781.064.000,- atau 7,37% , sehingga menghasilkan Indeks Efisiensi sebesar 12,03 dan Tingkat Efisiensi 11,03 (lebih besar dari 1) atau **Tidak Efisien**.

Adapun Capaian Tingkat Efisiensi dari masing-masing IK adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Capaian Output (%)	Capaian Input (anggaran) (%)	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	102,60	23,37	75 %	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	105,84	52,46	75 %	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,04	23,37	75 %	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	116,28	52,46	75 %	Tidak Efisien
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	27,02	-	
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	32,35	-	
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	22,95	-	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	0,00	-	
9	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	59,72	19,01	75 %	Tidak Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,13	22,78	75 %	Tidak Efisien
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	113,30	36,46	75 %	Tidak Efisien
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	108,37	33,94	75 %	Tidak Efisien
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	115,46	26,36	75 %	Tidak Efisien
14	Indeks Pelayanan Publik	-	0,00	-	
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	10,88	-	

No.	Indikator Kinerja	Capaian Output (%)	Capaian Input (anggaran) (%)	Capaian TE	Kriteria
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75,00	49,39	75 %	Tidak Efisien
17	Jumlah desa pangan aman	75,00	47,13	75 %	Tidak Efisien
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	55,57	75 %	Tidak Efisien
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	93,07	23,37	75 %	Tidak Efisien
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	94,62	52,46	75 %	Tidak Efisien
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	28,32	27,45	75 %	Tidak Efisien
22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	-	48,57	-	
23	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	-	27,81	-	
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	-	33,14	-	
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	10,94	-	
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	57,39	-	
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	66,76	38,27	75 %	Tidak Efisien
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	75	51,60	75%	Tidak Efisien
	TOTAL	88,72	27,41	75 %	Tidak Efisien

Faktor penghambat pencapaian ini adalah serapan anggaran sebagai capaian input yang terlalu kecil, sehingga apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebagai capaian output akan menghasilkan Indeks Efisiensi yang terlalu tinggi dan Tingkat Efisiensi yang lebih besar dari 1.

Untuk memperbaiki nilai indikator kinerja ini maka harus dilakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran disamping tetap melakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja lainnya.

3.3 Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berikut rincian realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020 per Sasaran Kinerja :

Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1.392.967.200	74.948.190	5,38
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah	533.065.000	51.294.563	9,62

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
	kerja Balai Besar POM di Banjarmasin			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	359.471.500	62.639.600	17,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	892.053.500	53.956.596	6,05
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	2.782.729.000	197.711.600	7,10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	348.241.800	18.737.048	5,38
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1.012.044.000	59.589.000	5,89
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	813.965.000	19.981.700	2,45

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	1.027.521.000	53.823.646	5,24
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27.995.084.000	100.163.378	0,36
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara akuntabel	18.623.922.000	3.420.340.132	18,37
	JUMLAH	55.781.064.000	4.113.185.453	7,37

Data berdasarkan OMSPAN

Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2021 ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan baik oleh Kementerian Keuangan, maupun Badan POM, yaitu :

Triwulan	Kementrian Keuangan	Badan POM
I	15	15
II	40	40
III	60	60
IV	90	99

Rendahnya serapan anggaran ini dipengaruhi juga oleh komposisi anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 yang terdiri dari 46,78% belanja modal dan 23,09% belanja pegawai, sehingga sangat sulit mencapai target triwulanan sebagaimana tabel di atas. Namun dengan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran diharapkan realisasi anggaran tahun 2021 dapat dicapai sesuai target dari Badan POM.

Target RPD s/d Triwulan II adalah 60%, untuk mencapainya dibutuhkan penyerapan tambahan sebesar +/- Rp. 8,5 Milyar lagi, dan sangat sulit dicapai kalau hanya berupa penyerapan anggaran belanja barang (52).

Upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap bulan,
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi, namun tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Pada triwulan II (dua) tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) sebesar 92,36% dengan kriteria **Baik**. Nilai tersebut diperoleh dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang NPSnya **Baik**, 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya memperoleh kriteria **Cukup**, dan 5 (lima) Sasaran Kegiatan lainnya belum dapat dinilai.

Ketiga Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya **Baik** adalah :

1. SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan NPS 97,94% ;
2. SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan NPS 106,82% ;
3. SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan NPS 101,38% ;
4. SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan NPS 98,92% ; dan
5. SK.10 Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan, dengan NPS 103,75

Sasaran Kinerja yang paling rendah NPSnya adalah SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan

di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, dengan NPS 35,94% dengan kriteria **Sangat Kurang**.

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, hanya 20 (duapuluh) yang sudah dapat dinilai pada akhir triwulan II tahun 2021 ini, dimana terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja yang memperoleh capaian dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja lainnya belum dapat dinilai, karena penilaian akan dilakukan di akhir tahun anggaran.

Nilai capaian kinerja terendah diperoleh IK.21 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan, yang hanya terealisasi sebesar 7,08 dari target 25, atau dengan capaian 35,94% dengan kriteria **Sangat Kurang**

Pagu anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 sesuai DIPA nomor Nomor : SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp. 55.781.064.000,- , dan mengalami pemotongan anggaran (refocussing) khusus belanja pegawai (tunjangan kinerja ke 14 dan 14) sehingga pagu menjadi 54.730.000.000 dengan komposisi anggaran yang didominasi Belanja Modal (53) sebesar Rp.26.095.141.000,- atau 47,68% , kemudian Belanja Barang (52) sebesar Rp.16.804.153.000,- atau 30,70% , serta Belanja Pegawai (51) sebesar Rp.11.830.706.000,- atau 21,62%. Komposisi ini sangat berpengaruh besar dalam capaian realisasi anggaran, dimana hampir seluruh belanja modal belum dapat direalisasikan dalam triwulan II tahun 2021.

Berdasarkan aplikasi OMSPAN, realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.000.236.633,- atau 27,41%. Serapan anggaran paling tinggi adalah belanja pegawai (51) sebesar 52,25%, diikuti oleh belanja barang (52) 38,56%, dan belanja modal (53) sebesar 9,19%.

Penyerapan belanja modal yang kurang maksimal ini disebabkan karena persiapan pengadaan belanja modal tidak dilaksanakan sebelum tahun berjalan. Adanya kesulitan penentuan lokasi Laboratorium Covid-19 dan penyesuaian alat-alat pendukung PCR juga memperlambat proses pengadaannya. Selain itu juga adanya kebutuhan pengadaan daya listrik pada bangunan gedung laboratorium baru agar dapat segera dimanfaatkan, sehingga harus dilakukan revisi DIPA.

Hasil pengukuran tingkat efisiensi pada triwulan II tahun 2021 ini, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (IE) lebih besar dari 1 (satu) sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah nilai 75% dengan kriteria **Tidak Efisien**. Nilai tersebut berasal dari 11 Sasaran Kinerja dan 28 Indikator Kinerja, dimana seluruhnya memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi adalah Tidak Efisien.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Sekaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, berikut ini adalah rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja di triwulan berikutnya, yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah baik agar tetap konsisten sampai dengan akhir tahun anggaran.
2. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran agar lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait pengadaan barang dan jasa, terutama belanja modal, baik dengan ULP Badan POM, APIP maupun pihak eksternal, agar pelaksanaannya dapat segera dilaksanakan dan sesuai ketentuan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.109.05.20.1731 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2021.**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 20 MAY 2020

KEPALA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.05.20.1731 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90,5



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,41
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	89
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	84
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)

KEPALA,



MUHAMMAD GUNTUR

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja, RAPK Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,50
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90,55

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00
		Indeks Pelayanan Publik	3,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,41
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	89,00
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	84,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	77,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp. 37.769.707.000,- |
| 2. | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp. 18.011.357.000,- |

Banjarmasin, 22 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama



Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	275.077.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	80,00	80,00	80,00	132.693.500
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	85,00	85,00	85,00	275.077.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	132.693.500
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	71,00	137.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87,50	134.340.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	75,00	86.670.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	90,55	126.820.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	89,00	89,00	148.610.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	60,00	60,00	76.206.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	88,00	88,00	88,00	75.096.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00	35,00	35,00	35,00	160.830.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	57,00	57,00	57,00	510.478.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,46	3,46	3,46	3,46	13.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	85,41	1.473.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	50%	80%	40,00	594.851.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	50%	85%	12,00	827.439.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	60%	70%	4,00	160.439.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60,00	70,00	80,00	90,00	630.670.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60,00	70,00	80,00	90,00	517.917.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00	50,00	75,00	83,00	1.012.044.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	89,00	374.050.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	84,00	231.670.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	77,00	527.772.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77,00	28.085.083.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	4.044.747.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	50	65	80	94,00	618.513.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	14.398.277.000
	J U M L A H						55.781.064.000

Banjarmasin, 22 Desember 2020



Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGADAAN SAMPEL	173.551.600
			'052	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL	202.784.000
			3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL	19.944.000
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	1.664.000
			B	RAPAT KOORDINASI TEKNIS OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	1.672.000
			C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN KEDEPUTIAN I DAN III	1.672.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			3165.QIA.007	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	
			'071	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL	20.346.400
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	2.504.000
			B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	2.504.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	
			3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70.514.800
			'052	Pengujian laboratorium sampel makanan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	156.114.800
			3165.QIA.002	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	7.347.200
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	2.424.000
			3165.QIA.003	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pengadaan & pemeriksaan sampel	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	7.499.200
			B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	4.672.000
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	1.904.000
			3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	12.933.600
			'052	Pengujian laboratorium sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	6.432.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGADAAN SAMPEL	173.551.600
			'052	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL	202.784.000
			3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	PENGADAAN SAMPEL	19.944.000
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	1.664.000
			B	RAPAT KOORDINASI TEKNIK OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	1.672.000
			C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	1.672.000
			3165.QIA.007	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	
			'071	Pengadaan & pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL	20.346.400
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	2.504.000
			B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	2.504.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	
			3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70.514.800
			'052	Pengujian laboratorium sampel makanan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	156.114.800
			3165.QIA.002	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	7.347.200
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	2.424.000
			3165.QIA.003	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh LokaPOM II	
			'071	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	7.499.200
			B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	4.672.000
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	1.904.000
			3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	12.933.600
			'052	Pengujian laboratorium sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	6.432.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/ BPOM	
			'051	Pelaksanaan Sosialisasi/ Edukasi Masyarakat	
			B	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI AJANG KREATIFITAS MILENIAL NUSANTARA : CERDAS MEMILIH KOSMETIK AMAN	137.000.000
			'052	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			A	KOORDINASI/ PENINGKATAN KOMPETENSI	13.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	
			'061	Pelaksanaan Sosialisasi/ Edukasi Masyarakat	
			A	SOSIALISASI KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	65.705.000
			'062	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			A	WORKSHOP KOMUNIKASI NEGOSIASI DAN DIPLOMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH PERBATASAN	4.655.000
			3165.BDC.003	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	
			'071	Pelaksanaan Sosialisasi/ Edukasi Masyarakat	
			A	SOSIALISASI KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	65.705.000
			'072	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			A	KOORDINASI/ PENINGKATAN KOMPETENSI	9.295.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	3165.BAH.001	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/ BPOM	
			'051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	
			B	PEMBINAAN UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN GMP/ GDP/ GRADING IRTP MENUJU MD	39.050.000
			'052	Penerbitan keputusan/ sertifikat layanan publik	
			A	Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Balai Besar / Balai / Loka POM	5.220.000
			B	Dukungan Pengembangan Inovasi di Bidang Pangan	4.850.000
			C	Forum Group Discussing Tindak Lanjut Dukungan Pengembangan Inovasi di Bidang Pangan di Daerah	24.510.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			D	Intensifikasi Peran PIC Balai Dalam Rangka Pemberdayaan UPT BPOM Melalui Program Magang	15.250.000
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			D	PEMERIKSAAN/ PEMBINAAN SARANA UMKM DALAM RANGKA E-REGISTRASI/ PEMENUHAN GMP	18.120.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	3165.BAH.001	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/ BPOM	
			'052	Penerbitan keputusan/ sertifikat layanan publik	
			E	Konsultasi/ Koordinasi	12.820.000
			F	Advokasi Stakeholder dalam rangka Perizinan/ Sertifikasi	5.800.000
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			E	KONSULTASI/ KOORDINASI/ ADVOKASI/ INSPEKSI/ UNDANGAN/ WORKSHOP	53.550.000
			F	PRESS CONFERENCE HASIL PENGAWASAN	3.350.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			K	PEKAN KEWASPADAAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT (Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar)	83.320.000
			3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	
			'062	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			B	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK	2.320.000
			3165.BDC.003	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	
			'072	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			A	KOORDINASI/ PENINGKATAN KOMPETENSI	4.647.500
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			G	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	5.660.000
			N	PELAYANAN PRIMA DAN BIMTEK E REGISTRATION PANGAN OLAHAN	18.350.000
			3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	'051	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI DALAM KOTA	3.680.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA	17.430.000
			C	JOIN INSPECTION	14.240.000
			'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	BIMTEK INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK TINGKAT DASAR DAN TINGKAT LANJUTAN	11.320.000
			3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	2.620.000
			'062	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	PELATIHAN NASIONAL FOOD INSPECTOR TINGKAT DASAR / MUDA	5.520.000
			3165.QIC.003	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	3.200.000
			'072	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	PELATIHAN FOOD INSPECTOR TINGKAT MUDA	5.760.000
			B	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BALAI BESAR / BALAI / LOKA POM	6.240.000
			C	BIMTEK INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK	5.760.000
			D	BIMTEK NASIONAL PENGAWAS PANGAN MENGENAI PENGAWASAN FORTIFIKASI PANGAN	1.030.000
			E	RAPAT KORDINASI TEKNIS OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.750.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			F	MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PRODUK TEMBAKAU	5.660.000
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	35.237.500
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR)	28.710.000
			C	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT/ PRODUK TEMBAKAU YANG BEREDAR	3.806.250
			'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	WORKSHOP PEMANTAPAN TEKNIK PENGAWASAN POST MARKET OBAT BEREDAR	5.660.000
			B	BIMBINGAN TEKNIK INSPEKTUR CPOTB LANJUTAN/ TOPIK KHUSUS	5.660.000
			C	PELATIHAN NASIONAL FOOD INSPEKTUR TINGKAT MUDA 2021	5.660.000
			H	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB	11.320.000
			3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN	8.490.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH LOKA POM KAB. HSU	
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	3.490.000
			'062	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			B	MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PRODUK TEMBAKAU	4.352.000
			C	BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN	4.350.000
			3165.QIC.006	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	3.218.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	3.170.000
			'072	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	WORKSHOP PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN POST-MARKET OBAT BEREDAR	5.840.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI DALAM KOTA	3.680.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA	17.430.000
			3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	2.620.000
			3165.QIC.003	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	3.200.000
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	35.237.500
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR)	28.710.000
			C	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT/ PRODUK TEMBAKAU YANG BEREDAR	3.806.250
			'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			D	BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN DIP BAGI PETUGAS PUSAT DAN DAERAH	5.660.000
			E	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.320.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			F	TOT DAN MONEV PELAPORAN OBAT SUBSTANDARD DAN PALSU MELALUI APLIKASI SMARTPHONE	11.320.000
			I	FGD DALAM RANGKA PENGAWASAN IMPLEMENTASI FORTIFIKASI PANGAN	11.320.000
			J	KONSULTASI/ KOORDINASI	48.096.000
			K	PEKAN KEWASPADAAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT (Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar)	
			L	PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)	112.376.000
			M	PELATIHAN PELAPORAN OBAT SUBSTANDARD DAN PALSU MELALUI APLIKASI SMARTPHONE UNTUK PETUGAS KESEHATAN / SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPADA SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN	30.369.000
			3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH LOKA POM KAB. HSU	8.490.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	3.490.000
			'062	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			A	TOT DAN MONEV PELAPORAN OBAT SUBSTANDARD DAN PALSU MELALUI APLIKASI SMARTPHONE	8.900.000
			3165.QIC.006	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	3.218.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	3.170.000
			'072	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			B	Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas Lintas Sektor Dalam Pengawasan ONPP Termasuk Obat JKN	5.564.000
			C	Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas Lintas Sektor Dalam Pengawasan ONPP Termasuk Obat JKN	30.000.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	3165.BAH.001	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/ BPOM	
			'051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	
			A	AUDIT SARANA PRODUKSI/ DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI/	18.239.000

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				PENERBITAN SKI/ SKE	
			3165.BAH.002	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM I	
			'053	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	
			A	AUDIT SARANA PRODUKSI/ DISTRIBUSI PRODUK OMKA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI/ PENERBITAN SKI/ SKE/ SERTIFIKASI HALAL	14.073.000
			3165.BAH.003	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	
			'054	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	
			A	AUDIT SARANA PRODUKSI/ DISTRIBUSI PRODUK OMKA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI/ PENERBITAN SKI/ SKE/ SERTIFIKASI HALAL	13.574.000
			3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH LOKA POM KAB. HSU	16.980.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	6.980.000
			3165.QIC.006	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	6.436.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	6.340.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI DALAM KOTA	7.360.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA DI LUAR KOTA	34.860.000
			3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	5.240.000
			3165.QIC.003	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pemeriksaan sarana	
			A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA	6.400.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	70.475.000
			B	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR)	57.420.000
			C	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT/ PRODUK TEMBAKAU YANG BEREDAR	7.612.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	
			'062	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			B	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK	2.320.000
			3165.BDC.003	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	
			'072	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	
			A	KOORDINASI/ PENINGKATAN KOMPETENSI	4.647.500
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			G	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	5.660.000
			N	PELAYANAN PRIMA DAN BIMTEK E REGISTRATION PANGAN OLAHAN	18.350.000
			3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	'062	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	
			D	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BALAI BESAR / BALAI / LOKA POM	2.175.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/ BPOM	
			'051	Pelaksanaan Sosialisasi/ Edukasi Masyarakat	
			A	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	1.200.000.000
			3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	
			'051	Koordinasi lintas sektor	
			A	ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS	78.720.000
			B	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN JAJAN ANAK SEKOLAH	78.720.000
			'052	Intervensi keamanan PJAS	
			A	BIMBINGAN TEKNIS DUTA PANGAN AMAN	192.720.000
			B	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	68.140.000
			C	AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH	46.390.000
			D	AUDIT PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH	41.040.000
			E	SAMPLING DAN OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	86.080.000
			F	MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI INTERVENSI KEAMANAN PJAS	3.041.000
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	
			'051	Perkuatan kapasitas desa	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	KOORDINASI DAN ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	72.800.000
			'052	Pemberdayaan komunitas desa	
			A	PELATIHAN KORLAP DAN KADER KEAMANAN PANGAN DAERAH	102.440.000
			B	BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS DESA	261.700.000
			C	GAP ASSESMENT / NEED ANALYSIS DAN FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	126.739.000
			'053	Pengawasan keamanan pangan desa	
			A	MOBIL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PRE DAN POST INTERVENSI KEAMANAN PANGAN	122.520.000
			B	MOBIL LAB KELILING DALAM RANGKA PENGAWALAN DESA YANG TELAH DIINTERVENSI DI TAHUN SEBELUMNYA	15.500.000
			'054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	
			A	MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	115.480.000
			B	LOMBA DESA PANGAN AMAN	10.260.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	
			'051	Perkuatan lintas sektor	
			A	ADVOKASI KOMITMEN PEMDA SERTA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	2.000.000
			'052	Pengadaan peralatan pendukung	
			A	PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG	4.979.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			'053	Sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan/ bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	
			A	KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	11.660.000
			B	PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR DAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PASAR	70.960.000
			C	SURVEY PASAR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	27.260.000
			'054	Pemantauan dan evaluasi	
			A	MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	32.520.000
			B	PENDAMPINGAN PETUGAS PENGAWAS PASAR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	11.060.000
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGADAAN SAMPEL	86.775.800
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	'052	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL	101.392.000
			3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL	9.972.000
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	832.000
			B	RAPAT KOORDINASI TEKNIS OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	836.000
			C	RAKOR PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	836.000
			3165.QIA.007	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	
			'071	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL	10.173.200
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT	1.252.000
			B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	1.252.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3165.QIA.001.051.A	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	35.257.400
			'052	Pengujian laboratorium sampel makanan	
			A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	78.057.400
			3165.QIA.002	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	
			'061	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	3.673.600
			'062	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	1.212.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			3165.QIA.003	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	
			'071	Pengadaan dan pemeriksaan sampel	
			A	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	3.749.600
			B	PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DI BALAI INDUK	2.336.000
			'072	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT BALAI DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING 2021	952.000
			3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/ BPOM	
			'051	Pengadaan sampel makanan	
			A	PENGADAAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	6.466.800
			'052	Pengujian laboratorium sampel	
			A	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEGIATAN GABUNGAN DENGAN KEDEPUTIAN I DAN III)	3.216.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/ BPOM	
			'051	Koordinasi lintas sektor kinerja penyidikan	
			A	WORKSHOP ANALISA PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	5.660.000
			B	KOORDINASI DALAM RANGKA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT	11.320.000
			C	FORUM KOORDINASI INTELLIJEN	16.092.000
			D	PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM	6.189.000
			E	PERTEMUAN PERKUATAN MEKANISME OPERASI	5.560.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	
			F	KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA/ GUGATAN HUKUM (PERMASALAHAN HUKUM) DI LINGKUNGAN BPOM	5.560.000
			'052	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan	
			A	BIMTEK APLIKASI DASHBOARD PENINDAKAN (PETA RAWAN KASUS)	5.560.000
			B	WORKSHOP MANAJEMEN INTELIJEN	5.560.000
			C	PEMBENTUKAN PETUGAS UNTELIJEN BPOM (DIKLAT INTEL DASAR)	5.560.000
			D	PERKUATAN PETUGAS INTELIJEN BPOM (DIKLAT INTELIJEN LANJUTAN)	5.560.000
			E	DIKLAT DAN PEMBENTUKAN PPNS BADAN POM	5.560.000
			F	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PENGELOLA BARANG BUKTI	5.560.000
			3165.AEA.002	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	
			'053	Koordinasi lintas sektor kinerja penyidikan	
			A	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN	3.995.000
			B	KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA / GUGATAN HUKUM (PERMASALAHAN HUKUM) DI LINGKUNGAN BPOM RI	3.995.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			C	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PENGELOLA BARANG BUKTI	3.935.000
			D	PEMBENTUKAN PETUGAS INTELIJEN BPOM	3.942.000
			'054	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan	
			A	PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM TA 2020	5.260.000
			3165.AEA.003	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh LokaPOM II	
			'055	Koordinasi lintas sektor kinerja penyidikan	
			A	PEMBENTUKAN PETUGAS INTELIJEN BPOM	5.740.000
			B	PERTEMUAN PERKUATAN MEKANISME OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	5.740.000
			C	KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA/ GUGATAN HUKUM (PERMASALAHAN HUKUM) DI LINGKUNGAN BPOM RI	5.764.000
			'056	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan	
			A	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PENGELOLA BARANG BUKTI	5.460.000
			3165.QCD.U34	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANJARMASIN	
			'051	Operasi Intelijen	
			A	PERENCANAAN OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	4.880.000
			B	PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	173.760.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			C	EVALUASI OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	3.904.000
			'052	Gelar Kasus dan Pelaporan	
			A	GELAR KASUS DAN PELAPORAN	2.928.000
			'053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	
			A	RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP	3.904.000
			'054	Operasi Penindakan	
			A	OPERASI PENINDAKAN	179.200.000
			B	PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	46.080.000
			'055	Pemberkasan	
			A	PEMBERKASAN	204.352.000
			B	KONSULTASI PENYELESAIAN MERKAS PERKARA	19.904.000
			C	GELAR PERKARA	6.752.000
			D	BANTUAN HUKUM	16.000.000
			E	PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI	61.680.000
			3165.QCD.U35	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	
			'051	Operasi Intelijen	
			A	PERENCANAAN OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	610.000
			B	PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	17.316.000
			C	EVALUASI OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	488.000
			'052	Gelar Kasus dan Pelaporan	
			A	GELAR KASUS DAN PELAPORAN	366.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			'053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	
			A	RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP	488.000
			'054	Operasi Penindakan	
			A	OPERASI PENINDAKAN	19.450.000
			B	PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	5.760.000
			'055	Pemberkasan	
			A	PEMBERKASAN	24.344.000
			B	KONSULTASI PENYELESAIAN MERKAS PERKARA	2.488.000
			C	GELAR PERKARA	844.000
			D	BANTUAN HUKUM	1.500.000
			E	PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI	6.910.000
			3165.QCD.U36	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN TANAH BUMBU	
			'051	Operasi Intelijen	
			A	PERENCANAAN OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	610.000
			B	PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	17.316.000
			C	EVALUASI OPERASI INTELIJEN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	488.000
			'052	Gelar Kasus dan Pelaporan	
			A	GELAR KASUS DAN PELAPORAN	366.000
			'053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	
			A	RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP	488.000
			'054	Operasi Penindakan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			A	OPERASI PENINDAKAN	19.450.000
			B	PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	5.760.000
			'055	Pemberkasan	
			A	PEMBERKASAN	24.344.000
			B	KONSULTASI PENYELESAIAN MERKAS PERKARA	2.488.000
			C	GELAR PERKARA	844.000
			D	BANTUAN HUKUM	1.500.000
			E	PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI	6.910.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	
			'051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	
			I	PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI	17.580.000
			J	PERSIAPAN ZONA INTEGRITAS UNTUK MERAH WBK	197.500.000
			K	PEMBUATAN VIDEO ZONA INTEGRITAS	100.000.000
			L	AWARENESS QMS ISO 9001:2015	4.730.000
			M	AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	19.470.000
			K	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB HSU	
				- 15 AWARENESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.430.000
				- 19 PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN REKONSILIASI DATA PEGAWAI	
				- 23 SINERGISME EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI IMPLEMENTASI RB DAN ZI WBK / WBBM	4.430.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				- 27 PELATIHAN AGENT OF CHANGE / REFORMASI BIROKRASI	12.160.000
				- 47 PELATIHAN TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP	5.300.000
			L	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB TANBU	
				- 13 SINERGISME EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI IMPLEMENTASI RB DAN ZI WBK / WBBM	5.660.000
				- 17 PELATIHAN AGENT OF CHANGE / REFORMASI BIROKRASI	8.960.000
				- 21 PELATIHAN TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP	5.860.000
				- 37 AWARENESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	5.460.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	
			'051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	
			A	PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAKIP	120.310.000
			B	KONSULTASI/ KOORDINASI/ SUPERVISI PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAKIP	105.360.000
			E	SOSIALISASI/ BIMTEK PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/ PIPK/ SPIP/ SAKIP	14.265.000
			F	PENGELOLAAN BMN / PEMUTAKHIRAN DATA BMN	118.420.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			G	ADMINISTRASI/ PERSIAPAN/ PENYELENG GARAAN PBJ	61.080.000
			'052	Pelaksanaan koordinasi	
			K	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB HSU	
				- 1 BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	2.000.000
				- 11 RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM)	4.430.000
				- 3 RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2021	8.330.000
				- 7 MONEV TEMATIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	15.360.000
			L	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB TANBU	
				- 1 RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM)	5.860.000
				- 41 BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	4.000.000
				- 5 RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2021	6.140.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profe sionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	
			'052	Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	
			E	BIMTEK ANALISIS BIDANG KOSMETIK DI BBPOM BANJARMASIN	10.460.000
			F	BIMTEK ANALISIS BIDANG PANGAN DI	10.460.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				BBPOM BANJARMASIN	
			G	BIMTEK ANALISIS BIDANG PANGAN DI BBPOM BANJARMASIN	10.460.000
			H	BIMTEK ANALISIS BIDANG PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DI BBPOM BANJARMASIN	10.460.000
			I	SURVEILAN LAB. OLEH KAN-BSN	92.367.000
			J	PELATIHAN MANAJEMEN / TEKNIS / PENINGKATAN KOMPETENSI	53.900.000
			K	KONSULTASI / KOORDINASI / PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGUJIAN BBPOM DI BANJARMASIN	37.140.000
			L	PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGUJIAN LOKA HSU	98.050.000
			M	PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGUJIAN LOKA TANBU	124.330.000
			3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	
			'052	Pelaksanaan koordinasi	
			A	PEMBINAAN OLEH ESELON I BADAN POM / PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PENGAMBILAN SUMPAH PNS/ PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN SPIRITUAL PEGAWAI	24.212.000
			B	PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN REKONSILIASI DATA PEGAWAI	5.860.000
			C	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL / PELATIHAN TEKNIS PFM (PEMBENTUKAN CALON PFM)/ DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM / WORKSHOP/ BIMTEK/	114.620.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				SEMINAR JABATAN FUNGSIONAL NON PFM	
			D	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.990.000
			F	PELATIHAN TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP	5.860.000
			G	WORKSHOP KOMUNIKASI, NEGOSIASI DAN DIPLOMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH PERBATASAN	4.730.000
			H	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	85.800.000
			I	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SATPAM, SOPIR DAN PRAMUBAKTI	23.200.000
			J	KOORDINASI/ KONSULTASI DALAM RANGKA TATA HUBUNGAN KERJA BBPOM DI BANJARMASIN	117.360.000
			K	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB HSU	
				- 19 PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN REKONSILIASI DATA PEGAWAI	7.830.000
				- 35 PELATIHAN TEKNIS PFM	22.150.000
				- 39 PELATIHAN TEKNIS NON PFM	7.830.000
				- 43 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PFM	8.860.000
				- 25 PELATIHAN FUNGSIONAL NON PFM	5.860.000
				- 29 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PFM	10.920.000
				- 33 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	5.460.000
				- 9 PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN REKONSILIASI DATA PEGAWAI	1.960.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	
			'051	Peningkatan kemampuan fungsi / kapasitas/ teknis laboratorium	
			A	UJI PROFISIENSI	5.000.000
			B	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM OLEH KAN-BSN	11.940.000
			C	FORUM DISEMINASI HASIL RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	4.630.000
			D	VALIDASI/ REVALIDASI/ VERIFIKASI METODE	51.000.000
			E	KELOMPOK JAMINAN MUTU	37.599.000
			F	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (FOOD SECURITY)	
			G	PENGUATAN PEMENUHAN STANDARD GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)	300.000
			H	REKALIBRASI/ VERIFIKASI PERALATAN	97.580.000
			I	PENGADAAN SUKU CADANG, KOLOM, GLASSWARE, MEDIA MIKRO PIHAK KETIGA/ KASUS, TEST KIT, K3 DAN GAS LAB DAN REAGEN PREKURSOR	1.190.456.000
			J	PENGADAAN REAGEN / SUKU CADANG PIHAK KETIGA / KASUS	190.000.000
			A	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	177.300.000
			B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	57.000.000
			C	PENGUATAN LABORATORIUM BPOM DALAM JEJARING NASIONAL DAN ASEAN TAHUN 2021	9.210.000
			D	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN	45.940.000

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
				LABORATORIUM BB / BALAI POM	
			3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	
			'051	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium	
			A	Refreshment Alat Laboratorium	5.811.141.000
			B	PCR (Tambahan)	3.564.000.000
			3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	
			'054	Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan	
			A	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TAHAP III	16.500.000.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	
			'051	Pengadaan kendaraan bermotor	
			A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Lapangan R2	60.000.000
			'052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	
			A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi untuk penyidikan	24.200.000
			'053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	
			A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	135.800.000
			3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	'051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	
			C	PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL	133.880.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			D	WORKSHOP/ BIMTEK PPK/ POKJA/ PEJABAT PENGADAAN/ PPHP	57.700.000
			E	SOSIALISASI/ BIMTEK PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/ PIPK/ SPIP/ SAKIP	14.265.000
			H	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN BBPOM DI BANJARMASIN	186.613.000
			'052	Pelaksanaan koordinasi	
			K	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB HSU	66.217.000
				- 31 PELATIHAN BENDAHARA NEGARA TERSERTIFIKASI	4.430.000
			L	ADMINISTRASI KEGIATAN DAN PERKANTORAN/ BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA POM DI KAB TANBU	145.690.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	
			'001	Gaji dan Tunjangan	
			A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5.902.667.000
			B	PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA	6.979.103.000
			'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
			A	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS BBPOM DI BANJARMASIN	150.480.000
			B	PENGADAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN BBPOM DI BANJARMASIN	99.000.000
			C	PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL BBPOM DI BANJARMASIN	187.487.000
			D	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BBPOM DI BANJARMASIN	181.500.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Kode	Uraian	Jumlah (Rupiah)
			E	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BBPOM DI BANJARMASIN	109.280.000
			F	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL BBPOM DI BANJARMASIN	129.000.000
			G	LANGGANAN DAYA DAN JASA BBPOM DI BANJARMASIN	693.600.000
			I	OPERASIONAL PERKANTORAN BBPOM DI BANJARMASIN	1.725.160.000
			J	KOORDINASI PIMPINAN BBPOM DI BANJARMASIN	549.240.000
			K	OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA POM DI KAB. HULU SUNGAI UTARA	533.490.000
			L	KOORDINASI PIMPINAN LOKA POM DI KAB. HULU SUNGAI UTARA	127.360.000
			M	OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA POM DI KAB. TANAH BUMBU	533.490.000
			N	KOORDINASI PIMPINAN LOKA POM DI KAB. TANAH BUMBU	110.500.000
		J U M L A H			55.781.064.000

Banjarmasin, 22 Desember 2020



Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.

Lampiran 3. SK Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.109.05.20.1728 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Loka POM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 18 Mei 2020

KEPALA



DR. MUHAMMAD GUNTUR

Lampiran 4. SK IKU BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.296 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan POM



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 – 2024;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin serta penetapan RS, RKT, RKA dan PK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 18 MAY 2020

KEPALA,

MUHAMMAD GUNTUR





BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI
BANJARMASIN

NOMOR : HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 – 2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

1. Nama Organisasi : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
 - e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 - f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama :



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	5 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		14 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	15 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		17 Jumlah desa pangan aman
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	22 Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
		23 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan BBPOM di Banjarmasin	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		26 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
		28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin



Lampiran 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024 (Lampiran Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OLEH BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN								53.400	58.740	64.610	71.080	78.980	
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin											
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	80,8	83,6	86,6	90	92,3	749,60	824,56	907,016	997,72	1.097,49	BBPOM di Banjarmasin
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	48,8	53,68	59,05	64,95	71,45	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	49,6	54,56	60,02	66,02	72,62	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	78	80	82	84	86	428,2	471,02	518,12	569,93	626,93	BBPOM di Banjarmasin
			78	80	82	84	86	16,55	18,26	20,03	22,03	24,23	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			78	80	82	84	86	24,11	26,52	29,17	32,09	35,3	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	94	94	94	95	95	93,7	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	6,1	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			94	94	94	95	95	6,2	6,82	7,5	8,25	9,08	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	85	86	87	88	89	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kab. H. S. Utara
			94	94	94	95	95	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	68	71	74	78	81	84,84	93,32	102,66	112,92	124,21	BBPOM di Banjarmasin
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	86	87.5	89	90.5	92	107,37	118,1	129,91	142,9	157,19	BBPOM di Banjarmasin
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	72	75	77	80	83	85,44	93,98	103,38	113,72	125,09	BBPOM di Banjarmasin
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Kalimantan Selatan	88.5	90.5	91	91.5	92	52,72	57,99	63,79	70,17	77,19	BBPOM di Banjarmasin

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kalimantan Selatan	87	89	91	93	95	70,34	77,37	85,11	93,62	102,98	BBPOM di Banjarmasin	
			87	89	91	93	95	27,92	30,71	33,78	37,16	40,87	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			87	89	91	93	95	25,55	28,11	30,92	34,01	37,41	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kalimantan Selatan	55	60	65	70	75	96,32	105,95	116,46	128,2	141,02	BBPOM di Banjarmasin	
			55	60	65	70	75	5,46	6,01	6,61	7,27	7,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			55	60	65	70	75	11,8	12,98	14,28	15,71	17,28	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kalimantan Selatan	82	84	86	88	90	77,48	85,23	93,75	103,13	113,44	BBPOM di Banjarmasin	
			82	84	86	88	90	14,68	16,15	17,76	19,54	21,49	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			82	84	86	88	90	14,16	15,58	17,13	18,85	20,73	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	20	21	22	23	24	110	121	133,1	146,41	161,05	BBPOM di Banjarmasin	
			20	21	22	23	24	16	17,6	19,36	21,29	23,43	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			20	21	22	23	24	37,04	40,74	44,82	49,3	54,23	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
4.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	55	57	60	63	65	539,66	593,62	652,98	718,28	790,11	BBPOM di Banjarmasin	
			55	57	60	63	65	16,99	18,69	20,56	22,61	24,87	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			55	57	60	63	65	6,06	6,67	7,34	8,07	8,88	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
4.6	Indeks Pelayanan Publik	Kalimantan Selatan	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	11,72	12,89	14,18	15,59	17,16	BBPOM di Banjarmasin	
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang	Kalimantan Selatan	72	75	78	81	85	851	936,1	1.029,71	1.326,68	1.245,95	BBPOM di Banjarmasin	
			72	75	78	81	85	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kab. H. S. Utara	
			72	75	78	81	85	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Kalimantan Selatan	20	40	62	82	104	510	561	617,1	678,81	746,69	BBPOM di Banjarmasin	
5.3	Jumlah desa pangan aman	Kalimantan Selatan	6	12	19	25	32	800	880	968	1.064,81	1.171,28	BBPOM di Banjarmasin	
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan Berbahaya	Kalimantan Selatan	2	4	6	8	10	140	154	169,4	186,34	204,97	BBPOM di Banjarmasin	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	93,7	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
				90	90	91	91	92	6,1	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				90	90	91	91	92	6,2	6,82	7,5	8,25	9,08	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
				90	90	91	91	92	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				90	90	91	91	92	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	81	83	85	88	90	767,85	844,64	929,09	1.022,01	1.124,21	BBPOM di Banjarmasin
				81	83	85	88	90	92,52	101,77	111,94	123,14	135,45	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				81	83	85	88	90	93,25	102,57	112,83	124,11	136,52	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	SK 8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif												
	8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	85	89	93	94	95	371,22	408,34	449,18	494,09	543,5	BBPOM di Banjarmasin
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM	Kalimantan Selatan	85	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,2	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				85	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,2	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	80	84	89	91	92	1.514,38	1.665,82	1.832,39	2.015,64	2.217,20	BBPOM di Banjarmasin
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	9,56	10,52	11,57	12,72	13,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				100	100	100	100	100	9,86	10,85	11,93	13,12	14,44	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	7,16	7,88	8,66	9,53	10,48	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				100	100	100	100	100	7,6	7,77	8,55	9,39	10,34	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	SK 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal												
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Kalimantan Selatan	75	77	80	82	85	384,68	423,15	465,46	512,01	563,21	BBPOM di Banjarmasin
				77	78	80	82	85	57,6	63,36	69,69	76,66	84,33	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				77	78	80	82	85	56,86	62,54	68,79	75,68	83,25	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
	10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Kalimantan Selatan	76	77	78	79	80	9.677,43	1.064,52	1.170,97	1.288,07	1.416,87	BBPOM di Banjarmasin
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Kalimantan Selatan	1,51	2	2,26	2,5	3	17.242,06	18.966,65	20.863,31	22.949,64	25.244,61	BBPOM di Banjarmasin
	SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel												
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	93	94	95	96	97	12.814,57	14.096,03	15.505,63	17.056,19	18.761,81	BBPOM di Banjarmasin
	11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	Kalimantan Selatan	90	92	92	95	95	3.755,28	4.130,81	4.543,89	4.998,28	5.498,10	BBPOM di Banjarmasin
				90	92	92	95	95	374,29	411,72	452,89	498,18	547,99	Loka POM di Kab. H. S. Utara
				90	92	92	95	95	379,69	417,66	459,42	505,37	555,9	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2021	Target triwulanan (kumulatif)	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2021 (kumulatif)
				s.d TW II			Pembilang	Penyebut	s.d TW I		
					Pembilang	Penyebut			Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	545	667	81,71	97,74	97,74
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	226	264	85,61	107,01	107,01
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	142	185	76,76	90,30	90,30
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	79	95	83,16	96,70	96,70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	5 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	71	-	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2021	Target triwulanan (kumulatif)	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2021 (kumulatif)	
				s.d TW II			Pembilang	Penyebut	s.d TW I			
					Pembilang	Penyebut			Realisasi			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	-	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75	-	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,55	-	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s,d triwulan n		341	431	72,49	81,45	81,45
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d triwulan n		72	122	57,19	95,32	95,32

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2021	Target triwulanan (kumulatif)	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2021 (kumulatif)
				s.d TW II	Pembilang	Penyebut	s.d TW I				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi		
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	659	674	97,77	111,11	111,11
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d triwulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s,d triwulan n	27	58	46,55	133,00	133,00
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d triwulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d triwulan n	204	314	64,97	113,98	113,98
		14 Indeks Pelayanan Publik	3,46	3,46	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	3,67	106,07	106,07
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,41	-	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP		-	-	-	-	-
		16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40 (100%)	50%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%				45,5%	91,00	45,50
		17 Jumlah desa pangan aman	12 (100%)	50%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%				57,5%	115,00	57,50
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4 (100%)	60%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%				65%	108,33	65,00

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2021	Target triwulanan (kumulatif)	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2021 (kumulatif)		
					s.d TW II			Pembilang	Penyebut	s.d TW I				
										Pembilang			Penyebut	Realisasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	60	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s,d tahun n		49,57	82,62	55,08			
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	60	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d tahun n		39,46	65,77	43,84			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83	25	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	19,77	79,08	23,82		
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	89	-	Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-		
		23	Nilai AKIP UPT	84	-	Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	-	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	-	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-		
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2	2	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,075	103,75	103,75		

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2021	Target triwulanan (kumulatif)	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2021 (kumulatif)
				s.d TW II			s.d TW I				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	94	65	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	52,59	80,91	55,95		
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien 92%	Efisien 92%	(indeks efisiensi dikurangi standar efisiensi) s.d triwulan n	standar efisiensi s.d triwulan n	-	-	Tidak Efisien 75%	81,52	81,52	

Banjarmasin, 9 Juli 2021
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin


Dr. Leonard Duma, Apt., MM



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.40 Banjarmasin

e-mail :

bpom_banjarmasin@pom.go.id

